

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Akuntansi keberlanjutan merupakan sebuah pengembangan paradigma yang di dalamnya mencakup pelaporan dan pengukuran kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu organisasi. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, namun juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam aktivitas bisnisnya. Penerapan akuntansi keberlanjutan menjadi paradigma penting karena dapat menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, dimana perusahaan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan lebih cenderung memiliki hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkontribusi pada stabilitas bisnis yang dijalankan oleh suatu organisasi (Dworczak, 2020).

Ozili (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan aspek penting yang dapat dijadikan sebagai paradigma dalam aktivitas organisasi. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), akuntansi keberlanjutan membantu organisasi memahami dan mengukur dampak aktivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Akuntansi keberlanjutan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan menerapkan standar pelaporan keberlanjutan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) Atau *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB).



SASB ini dijadikan patokan bagi organisasi *nonprofit* yang fokus pada pengan standar pelaporan yang mengaitkan informasi lingkungan, sosial,

dan tata kelola (Eng dkk, 2022). Standar ini dirancang dengan tujuan dapat diintegrasikan dalam bentuk pelaporan yang dijadikan rujukan untuk mengatasi berbagai isu terkait perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, inovasi teknologi yang dijadikan alasan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan bagi suatu organisasi (Laine dkk, 2021). Penerapan standar ini bertujuan untuk menjaga reputasi dan regulasi serta mendorong efisiensi dan inovasi di dalam suatu organisasi.

Sukaharsono dan Andayani (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa di dalam suatu organisasi yang tidak menerapkan keberlanjutan dapat menghadapi risiko hukum, kehilangan kepercayaan pelanggan atau mengalami tekanan dari investor yang semakin peduli terhadap *environmental, social and govearnance*. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, perusahaan dapat menghemat sumber daya, mengurangi limbah serta mengembangkan produk dan layanan inovatif yang lebih ramah lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang berdampak kepada Masyarakat dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, biaya yang lebih besar dan ditutupnya suatu organisasi karena lalai dalam memperhatikan masalah lingkungan. Razak (2023) dan Armansyah-Daerah (2022) mengungkapkan dampak lingkungan dari aktivitas industri karena adanya keserakahan manusia sehingga terjadi peningkatan emisi CO₂ dan pemanasan global, kualitas udara yang buruk, dan kerusakan lingkungan di area industri hingga kurangnya tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan.

Dalam perspektif akuntansi keberlanjutan, masalah lingkungan menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih belum mengintegrasikan biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Hal ini terjadi karena tidak adanya regulasi yang mewajibkan pelaporan dampak lingkungan, rendahnya kesadaran



perusahaan dalam menghitung biaya lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, dan hanya fokus pada pencitraan positif tanpa memikirkan untuk mengurangi dampak negatifnya. Solusi yang ditawarkan dalam kerangka akuntansi keberlanjutan dengan menerapkan standar pelaporan berkelanjutan dengan menggunakan *framework* seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk memastikan perusahaan transparan dalam melaporkan dampak lingkungannya (Manochin dkk, 2008; Rao, 2023; Wardokhi dkk, 2023a).

Seringkali adopsi ini tidak dilakukan secara sukarela, namun karena adanya regulasi atau tekanan seperti *General Reporting Initiative* (GRI), tekanan dari aktivitas lingkungan yang dijadikan dasar untuk diadopsi dalam suatu organisasi (Asfaw dkk, 2017; Doh dan Guay, 2006). Bebbington dan Larrinaga (2014) menawarkan pendekatan akuntansi keberlanjutan dengan beberapa indikator diantaranya: pelaporan berkelanjutan, materialitas, etik, pemangku kepentingan, pelatihan/pendidikan, dan teknologi digital. Klymenko dkk (2020); Tran dkk (2023); dan Setia dkk (2022) mengungkapkan bahwa apabila organisasi mengutamakan aspek berkelanjutan dengan memperhatikan keadaan ekonomi, sosial, lingkungan maka akan berdampak pada kinerja perusahaan serta menentukan masa depan yang berkelanjutan.

Praktik keberlanjutan mengalami peningkatan baik dari sisi organisasi *profit* maupun organisasi *nonprofit*, hal itu disebabkan karena meningkatnya kekhawatiran terhadap faktor sosial, lingkungan dan ekonomi yang merupakan tanggung jawab Bersama (Burritt dan Schaltegger, 2010; O'Dwyer dkk, 2011). Meskipun terdapat banyak kekhawatiran dari pemangku kepentingan, namun masih banyak organisasi belum menerapkan keberlanjutan di dalam aktivitasnya,



jadi karena masih terbatasnya mekanisme peraturan dan akuntabilitas, (Manochin dkk, 20193a).

Ceesay (2020) mengungkapkan bahwa untuk tercapainya akuntansi keberlanjutan diperlukan campur tangan *Non-Governmental Organizations* (NGO) /Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan menerapkan dua indikator. Pertama: kemitraan kolaboratif (kolaborasi dengan organisasi pemerintah dan masyarakat sipil. Kedua taktik konfrontatif dengan merusak reputasi organisasi melalui media sosial ketika mengabaikan praktik keberlanjutan.

Pada umumnya LSM memiliki pengaruh besar dalam mendefinisikan keadilan sosial dan kesejahteraan *social* (Abela, 2022; Channuntapipat dkk, 2020; Gachie, 2021; Janggu dkk, 2014; Khan, 2011; Peršić dkk, 2017; Sudana dkk, 2014). Meskipun LSM memiliki peran besar dalam mendorong keadilan sosial, tantangan dalam transparansi keuangan dapat menghambat efektivitas suatu organisasi.

Pada dasarnya LSM dapat membantu organisasi menerapkan indikator keberlanjutan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan penerapan standar pelaporan yang lebih baik, maka LSM dapat mempertahankan legitimasi dan terus berkontribusi dalam pembangunan social yang berkelanjutan (Basnyat dan Lao, 2020; Herz dan Rogers, 2016; Slack, 2022). Pihak LSM dijadikan sebagai salah satu untuk mencegah suatu organisasi mengalami kegagalan dalam menjalankan sebuah bisnis ketika memiliki campur tangan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Kegagalan suatu organisasi dalam mempertahankan keberlanjutan bisnisnya sering kali disebabkan oleh tidak adanya standar atau kerangka keberlanjutan yang terintegrasi dalam strategis bisnis . Keberlanjutan bukan tentang menjalankan bisnis secara etis, tetapi juga tentang membangun



reputasi, menciptakan nilai jangka panjang dan memastikan keberlanjutan operasional di masa depan (Eccles dkk, 2012).

Isu-isu keberlanjutan akan selalu muncul dalam berbagai era, namun perusahaan yang memiliki strategi adaptif dan komitmen terhadap keberlanjutan akan mampu bertahan dan berkembang (S. Lodhia dan Hess, 2014). Esposito dkk, (2021) dan Rahmansyah dkk, (2023) mengintegrasikan keberlanjutan dalam model bisnis, operasional dan strategi jangka panjang, organisasi dapat menciptakan nilai yang lebih besar bagi pemangku kepentingan atau kelangsungan bisnis yang dijalankan oleh suatu organisasi.

Standar yang dituangkan bagi organisasi *profit* maupun *nonprofit* memiliki peranan penting untuk membentuk kewajiban dalam melihat pertanggungjawaban sebagai upaya untuk menerapkan praktik organisasi yang berkelanjutan. Kerangka kerja untuk pelaporan berkelanjutan disebut *Global Reporting Initiative (GRI)*, kerangka ini merupakan salah satu bentuk organisasi independen internasional yang membantu bisnis, pemerintah, organisasi lain dalam memahami dan mengkomunikasikan dampak/isu-isu seperti iklim, hak asasi manusia, dan korupsi (Agustia dkk, 2023).

Pelaporan berkelanjutan yang dapat membantu suatu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan dalam rangka membuat aktivitas perusahaan lebih berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat membantu organisasi memberikan informasi kepada masyarakat terkait masalah-masalah keberlanjutannya (*Global Sustainability Standards Board, 2013*). GRI sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas organisasi sebagai tanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan mengenai



organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang
nya membahas pelaporan ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial

sama halnya dengan konsep *triple bottom line* (TBL), pelaporan CSR, dan sebagainya (Sukaharsono dan Andayani, 2021).

Dampak kegiatan keberlanjutan yang telah diuraikan di atas tersebut yaitu konsep TBL yang diterapkan sebagai teknik pengukuran, melaporkan manfaat dari indikator yang ada di laporan publik oleh suatu organisasi (Bebbington dan Larrinaga, 2014). Konsep ini dijadikan salah satu bentuk respon pertanggungjawaban dari manusia modern yang mendukung keberlanjutan atau kelestarian lingkungan, dan gagasan ini pertama kali digunakan oleh Elkington pada tahun 1997 (Elkington, 2013).

Upward dan Jones (2016) menjelaskan bahwa dengan memasukkan dimensi lingkungan akan membentuk keberlanjutan yang lemah, tetapi ketika memasukkan seluruh dimensi keberlanjutan yaitu sosio-ekologis akan membentuk keberlanjutan yang kuat. Setiap organisasi menginginkan bisnis yang dapat bertahan dalam jangka panjang sehingga konsep ini dijadikan alasan untuk mendukung cara berfikir dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Zyznarska dan Dworzak (2020) dalam penelitiannya menganalisis organisasi untuk berinvestasi ke sumber daya manusia serta lingkungan. Investasi tersebut dapat mendukung keberlanjutan dengan Hadirnya sumber daya manusia yang paham terkait bidang keuangan dan *non* keuangan yang dijadikan sebagai patokan menuju organisasi keberlanjutan khususnya berkaitan dengan analisis bisnis (Amerieska, 2017).

Baker dkk (2023) dalam penelitiannya telah menerapkan keberlanjutan dalam organisasi dengan menanamkan beberapa pendekatan diantaranya:



an pertama yaitu *Corporate Sustainability and Environmental
ing Perspective* (CSEAP), fokus tanggungjawab sosial di dalam sebuah

entitas harus menjadi bagian integral dari praktik akuntansi dengan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas, pendekatan kedua yaitu *Pragmatic Sustainability Accounting Perspective* (PSMAP), fokus ini melakukan perbaikan pada manajemen dan akuntansi yang berkaitan dengan konsep keberlanjutan.

Konteks keberlanjutan memiliki manfaat untuk menciptakan *image* usaha atau nilai positif, namun beberapa organisasi tidak menerapkan keberlanjutan dengan melakukan kegiatan sosial dan mengabaikan lingkungan, diantaranya tidak lagi mengeluarkan kegiatan sosial, tidak memberikan dana untuk pelatihan, pendidikan bagi karyawan, tidak membentuk internal *control* dengan memasukkan tenaga profesional, hingga kekhawatiran yang muncul berbagai isu dan adanya faktor politik yang mengharuskan melakukan penghematan dan berhati-hati dalam bertindak untuk mengeluarkan biaya yang tidak bermanfaat (Villiers dan Staden, 2014; Lodhia dan Sharma, 2019; Khan, 2013; Lodhia dkk, 2021; Lewandowska dkk, 2023; Arora dkk, 2023; Malik dan Shim, 2022). Sukoharsono (2019) mengungkapkan konsep keberlanjutan diabaikan karena menanamkan sifat kapitalisme, eksploitatif, dan tidak adanya nilai spiritual di dalam suatu organisasi.

Aktivitas keberlanjutan dalam organisasi dapat diterapkan dengan mengaitkan nilai spiritual/religius di dalamnya. Nilai religius yang dimaksud yaitu: amanah, dan ikhlas yang dapat menciptakan keseimbangan spiritual dan mental (Sukaharsono dan Andayani, 2021).

Molisa (2011) menjelaskan bahwa nilai spiritual dalam praktik akuntansi sosial dapat mencerminkan perilaku manusia yang sadar terhadap perubahan sosial dan mendorong perubahan yang berkelanjutan. Konsep ini lebih
kan pada hubungan masyarakat sekitar, lingkungan dan sosial hingga
a (Saraswati dan Alam, 2022). Brown (2009) dan Tommasetti dkk (2020)



dalam penelitiannya menekankan bahwa perusahaan dapat bersikap individualism dengan cara memilih dan mengembangkan sistem akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai internal yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan suatu organisasi untuk menonjolkan inisiatif keberlanjutan dengan cara yang mencerminkan identitas dan misi sendiri.

Individualisme mengacu pada penekanan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam pengambilan keputusan. Individualisme dapat dilihat dengan cara individu atau perusahaan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis untuk menciptakan peluang baru di pasar (Simas dkk, 2018).

Sustainability accounting pada sudut pandang modernisme dianggap sebagai alat untuk menciptakan reputasi suatu perusahaan yang berkelanjutan. Pandangan ini dianggap belum cukup untuk mencerminkan sebagai *sustainability accounting* yang sebenarnya, karena hanya berfokus pada reputasi yang bertujuan untuk mendapatkan simpati masyarakat, namun reputasi itu belum tentu didasarkan pada kualitas perusahaan yang sesuai.

Pandangan postmodernisme digunakan untuk menilai *sustainability accounting* tidak hanya sekedar melihat reputasi tetapi bagaimana perusahaan menciptakan sebuah reputasi yang didasarkan pada aktivitas bisnis yang mendukung kelestarian baik lingkungan dan manusia.

Pandangan posmodernisme selalu mendorong untuk mengembangkan atau menciptakan ide atau konsep baru terhadap konsep yang ada. Dalam konteks aktivitas *sustainability accounting* secara umum menerapkan aspek *profit*, sosial dan lingkungan di dalam aktivitas organisasi, namun hal itu belum



cukup, sehingga penelitian ini membangun sebuah konsep baru memasukkan aspek religius dalam konsep *sustainability accounting*

tersebut. Hal ini dianggap mampu melengkapi konsep keberlanjutan yang tidak hanya menekankan pada tuntutan aturan (*profit*, sosial dan lingkungan), tetapi juga menyangkut kesadaran diri individu (religius) (Dewi, 2021a).

Healey (1997) mengungkapkan pada dasarnya setiap masyarakat hidup dalam pluralis dimana kepentingan publik telah digantikan dengan imajinasi individual terkait pengakuan akan keberagaman cara menjalani kehidupan sehari-hari dan menghargai lingkungan sekitar. Sukoharsono (2018) mengungkapkan dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi akan meningkatkan penggunaan dimensi keberlanjutan dengan tujuan untuk mengungkapkan transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi sehingga tercapai masyarakat yang damai.

Meskipun akuntansi keberlanjutan membawa banyak manfaat, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong inovasi dan pengembangan produk/layanan yang lebih ramah lingkungan, tetapi ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan terkait pendekatan yang bersifat kapitalisme yang dikaitkan dengan standar pelaporan. Pertama, indikator GRI terkait aspek sosial merupakan kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk pelaporan keberlanjutan, namun indikator GRI, terutama yang terkait dengan aspek sosial (*people*) seringkali dikritik karena berbasis pada prinsip-prinsip kapitalisme. Contohnya indikator seperti keterlibatan masyarakat dan hak asasi manusia dapat diinterpretasikan dalam cara mempertahankan struktur kekuasaan kapitalis dimana perusahaan lebih fokus pada reputasi dan keuntungan jangka panjang dari pada keadilan sosial yang sebenarnya (Montecalvo dkk, 2018; Robertson dkk, 2022).



Kedua adanya tekanan pemangku kepentingan, dimana akuntansi keberlanjutan seringkali dipengaruhi oleh tekanan pemangku kepentingan yang

beragam, termasuk investor, konsumen dan masyarakat. Namun tekanan ini kadang-kadang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan sosial dan lingkungan, sehingga membatasi potensi sebenarnya dari akuntansi keberlanjutan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih mendalam.

Ketiga adanya komitmen manajemen puncak terhadap pelaporan keberlanjutan juga menjadi faktor kritis. Manajemen yang lebih fokus pada keuntungan jangka pendek mungkin tidak sepenuh hati mendukung inisiatif keberlanjutan, terutama jika dianggap tidak sejalan dengan tujuan keuangan. Ini berarti bahwa indikator sosial GRI mungkin tidak diungkapkan secara komprehensif atau akurat, karena prioritas utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan (Pesci dkk, 2023).

Praktik pelaporan keberlanjutan yang didorong oleh kapitalisme seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Perusahaan mungkin melakukan eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat secara tak terkendali untuk mencapai tujuan keuangan, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa indikator GRI yang ada tidak cukup untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, karena masih banyak indikator yang tidak diungkapkan atau diungkapkan secara minimal.

Hal yang menjadi pertentangan di dalam menuju keberlanjutan adalah terkait pandangan Kapitalisme dan Muammalah, dimana pandangan kapitalisme ini selalu identik dengan sikap individual, mengejar laba, mengakumulasi modal/kekayaan dan tidak memiliki kepekaan sosial (Huda, 2016). Kapitalisme

salah satu alasan bagi kaum muslim menolak untuk mengikuti paham ne yang sifatnya merugikan pihak lain yang hanya berfokus pada laba



dan dipakai secara individu dan tidak dimanfaatkan dan digunakan secara bersama. Kapitalisme memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian dengan mangadopsi akuntansi tradisional dengan menyusun pelaporan keuangan berbasis standar yang diperuntukkan bagi investor dengan menekankan untuk mengejar laba sebanyak-banyaknya dan mengecilkan biaya (Nugrahanti, 2016).

Pada umumnya kapitalisme akan selalu hadir di setiap organisasi dan bisa dihindari dengan membentuk sumber daya manusia, sehingga manusia memerlukan latihan religiusitas dalam menciptakan individu secara mental dan terlibat dengan tuhan sehingga bisa meredam sifat kapitalisme (Rodliyah dan Mulawarman, 2019). Triyuwono (2004) melakukan kritik terkait akuntansi kapitalistik, akuntansi bukanlah alat yang dibentuk dan digunakan kelas kapitalis, dan bukan hanya sekedar teknik pencatatan keuangan, tetapi juga alat ideologi yang digunakan untuk melegitimasi dan memperkuat sistem kapitalistik. Akuntansi kapitalistik berbasis profitabilitas, efisiensi, menguburkan realitas eksploitasi, dan ketidakadilan yang inheren dengan sistem kapitalisme. Dengan adanya paham kapitalisme, maka menyerukan beberapa alternatif diantaranya: memadukan nilai-nilai sosial dan lingkungan, memberdayakan masyarakat, melegitimasi sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Prawironegoro dkk, 2014).

Adapun alternatif keberlanjutan yang terbentuk di dalam suatu organisasi dengan menggunakan beberapa konsep salah satunya pemikiran teologi Al Maun yang mengatakan bahwa menjalankan sebuah bisnis bukan hanya memikirkan keuntungan tetapi memikirkan kehidupan lain yaitu sosial, sehingga dengan adanya konsep ini membuat di dalam organisasi menjadi eksis hal itu terlihat organisasi Muhammadiyah berkembang



dengan membuat berbagai ribuan sekolah, rumah sakit, dan lembaga pelayanan sosial lainnya (Nurhadi, 2021). Hal itu sejalan dengan penelitian (Rayyani dan Abbas, 2020) yang mengatakan pemikiran teologi Al Ma'un dijalankan di organisasi dengan menerapkan dalam menjalankan bisnis sebuah nilai nilai yang mencakup: ukhuwah, ikhlas, profesionalisme, kemandirian, nilai efisien, efektif dan keterbukaan dalam menjalankan program kerja yang ada di Organisasi.

Praktek keberlanjutan yang melibatkan aspek religiusitas di dalam suatu organisasi sangat membantu dalam mendukung jalannya organisasi yang lebih komprehensif. Misalnya di Indonesia terdapat organisasi besar yang memiliki aktivitas dalam berbagai bentuk kegiatan sosial yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia sangat memungkinkan menerapkan aspek keberlanjutan yang menggunakan unsur religiusitas dalam aktivitasnya.

Pajarianto dkk (2023) mengatakan bahwa perguruan tinggi persyarikatan Muhammadiyah membentuk tata nilai yang mendukung keberlanjutan suatu organisasi dengan menerapkan nilai yang diakronimkan menjadi *Read* (Iqra) : mengembalikan pendidikan untuk memelihara fitrah manusia (*restoration*), mencerahkan manusia tanpa diskriminasi menuju insan kamil (*enlightening*), memajukan peradaban manusia melalui pendidikan (*advanced*), serta pendidikan yang menggembirakan melalui interaksi semua komponen pendidikan (*Delightful*). Implementasi ini akan membentuk budaya kerja dan akademik yang kokoh dan diperlukan adanya keterkaitan religius.

Surtanto (2011) menyebutkan perkembangan Muhammadiyah tidak terlepas dari gerakan islam modern yang fokus pada tajdid. Gerakan ini akan

tu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi dan kan islam rahmatan lil alamin baik persoalan agama, sosial, budaya dan



ekonomi seperti kelaparan, perampasan hak asasi manusia, demokrasi dan lainnya. Salah satu bentuk kemajuan Muhammadiyah yang diungkapkan di harian Suara Muhammadiyah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi yang didirikan menerapkan transparansi, akuntabilitas, *responsibility* (Jamaah, 2022; Nashir, 2022).

Perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) yang dijadikan salah satu organisasi *profit* dan *non profit* dengan menerapkan konteks keberlanjutan, maka dibentuk suatu strategi yang menjadi pembedah dari organisasi *non profit* lainnya dengan melakukan perbaikan dan pengembangan serta membantu sesama ummat atau anggota. Strategi keberlanjutan yang dimaksud diantaranya: Diversifikasi sumber pendanaan yang berasal dari Amal usaha Muhammadiyah (*profit*), peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan tujuan untuk menghemat biaya dan selalu menanamkan di dalam organisasi, untuk mengembangkan organisasi dan tidak memikirkan untuk mencari hidup tetapi hiduplah Muhammadiyah, jika organisasi mulai berkembang, maka ummatnya juga akan ikut berkembang, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, serta pembangunan kemitraan diantaranya seperti pemerintah swasta, dan organisasi *non profit* lainnya.

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi islam sosial kemasyarakatan, dapat mengintegrasikan indikator GRI bagian masyarakat ke dalam proses akuntansi keberlanjutan. Pertama: prinsip syariah dan keadilan sosial, Muhammadiyah mengintegrasikan nilai-nilai islam yang menekankan pada keadilan, kesalehan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks kinerja

berarti bahwa organisasi harus memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan



keadilan sosial. Kedua: keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Muhammadiyah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam evaluasi kinerja sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa kegiatan operasional organisasi berdampak positif pada masyarakat setempat. Ketiga: Pelaporan yang transparan dan akuntabel, Muhammadiyah menggunakan indikator GRI bagian masyarakat untuk memastikan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Laporan keberlanjutan disusun dengan cara komprehensif mencakup aspek ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, hak asasi manusia dan keterlibatan masyarakat. Ini akan dipresentasikan dalam format yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

Muhammadiyah melakukan pengembangan melalui ekosistem ekonomi dan bisnis Muhammadiyah. Seperti diketahui salah satu Amal Usaha Muhammadiyah bergerak dalam dunia pendidikan, kemudian membentuk Amal Usaha lainnya dalam unit bisnis lainnya dalam bentuk produk dan untuk mengembangkan dan bertumbuh diperlukan kerjasama seluruh anggota Muhammadiyah. Unit bisnis yang dijalankan Muhammadiyah adalah rumah bersubsidi, bidang farmasi dan kesehatan, surya mart, dan logmart, diharapkan usaha ini dikembangkan untuk membantu kemaslahatan dibidang perekonomian dan bagi masyarakat (Persyarikatan, 2023). Organisasi Muhammadiyah berkembang dari dunia pendidikan untuk mendukung keberlanjutan maka dibutuhkan penguatan sumber daya manusia baik dalam dunia pendidikan, bisnis dan keagamaan (Binangkit dan Siregar, 2020).

Hal lain dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis yang n atau disisihkan dana untuk memperhatikan keadaan lingkungan dan kat dengan tujuan menjaga lingkungan agar tidak tercemar, serta



melakukan kegiatan menanam pohon. Konsep ini dikategorikan sebagai kegiatan sosial dan lingkungan. Dimana salah satu untuk mengembangkan suatu organisasi maka harus mengembangkan sumber daya manusia dan memperhatikan lingkungan sebagai dampak hubungan antara organisasi dengan manusia, dan lingkungan. Pada umumnya persyarikatan membina Amal Usaha Muhammadiyah dengan tujuan semakin besar dan tidak melupakan persyarikatan yang membesarkannya, jika suatu Provinsi mengalami perkembangan dari hal dana yang kelebihan, maka akan memberikan bantuan kepada Pusat hingga wilayah lainnya sehingga wilayah Muhammadiyah lainnya bisa ikut berkembang dan berkelanjutan (Suroso, 2023).

Seperti kita ketahui selama 5 tahun terakhir Muhammadiyah berkembang menjadi Universitas, mulai dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut hingga beralih ke tingkat Universitas, yang dapat dilihat dari grafik yang ada dibawah ini :

Aktivitas Muhammadiyah selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan pesat dalam bidang Pendidikan. Selain bidang pendidikan Muhammadiyah menjalankan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diantaranya : kesehatan dan investasi. Pada umumnya suatu organisasi mampu bertahan karena memiliki usaha lebih dari satu serta menerapkan sikap saling membantu antara satu dengan yang lainnya atau menerapkan sikap gotong royong.

Pada umumnya Muhammadiyah terbentuk karena pemikiran Kiyai H. Ahmad Dahlan yang ingin mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan melalui pendidikan. Pernyataan tersebut menggambarkan esensi dan visi awal pendirian Muhammadiyah yang



pada pemikiran Kiyai H. Ahmad Dahlan. Inti dari pemikiran beliau adalah an sebuah organisasi yang mampu memberantas kemiskinan dan

kebodohan melalui pendidikan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan Islam tidak hanya berhenti pada aspek keagamaan dan pendidikan, tetapi juga mengembangkan berbagai bidang usaha yang mendukung keberlangsungan dan pengembangan organisasi itu sendiri. Berikut ini penjelasan mendalam terkait bidang usaha yang dimiliki Muhammadiyah dan kaitannya dengan visi awal tersebut.

Pendidikan merupakan fondasi utama yang dibangun oleh Muhammadiyah. Kiyai Ahmad Dahlan memandang pendidikan sebagai kunci untuk mengangkat derajat masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang dikenal dengan amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan yang kuat sehingga menghasilkan generasi yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Pendidikan Muhammadiyah juga berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa.

Muhammadiyah juga mengembangkan amal usaha di bidang kesehatan, terutama dengan mendirikan rumah sakit dan klinik. Rumah sakit Muhammadiyah berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan yang tidak hanya memberikan layanan medis berkualitas, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman. Keberadaan rumah sakit ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang kurang mampu

untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Amal usaha di bidang



kesehatan ini juga menjadi sumber pendanaan yang dapat mendukung kegiatan sosial dan pendidikan Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga mengelola berbagai unit bisnis dan amal usaha lainnya yang menghasilkan keuntungan. Contohnya bisa berupa usaha di bidang perdagangan, percetakan, penerbitan, dan usaha lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi. Keuntungan yang diperoleh dari unit bisnis ini kemudian dikembalikan kepada organisasi untuk membiayai kegiatan amal usaha lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Model bisnis ini menciptakan kemandirian finansial bagi Muhammadiyah sehingga organisasi dapat bertahan dan berkembang tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

Keterkaitan antara bidang usaha pendidikan, kesehatan, dan amal usaha lainnya ini sangat erat dan saling mendukung. Pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kesehatan memastikan masyarakat yang sehat dan produktif, sementara amal usaha lainnya menyediakan sumber dana yang berkelanjutan untuk mendukung semua kegiatan tersebut. Dengan demikian, Muhammadiyah mampu menjalankan visi awalnya secara menyeluruh, yaitu memberantas kemiskinan dan kebodohan melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

Muhammadiyah bukan hanya sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga merupakan lembaga sosial yang memiliki sistem amal usaha yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan Muhammadiyah untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang usaha lainnya, sehingga visi Kiyai H. Ahmad Dahlan dapat terus diwujudkan hingga masa yang akan datang.



Perkembangan Muhammadiyah selama 5 tahun terakhir yang ormasi dari jenjang Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut hingga

akhirnya menjadi Universitas merupakan sebuah proses yang mencerminkan kemajuan dan peningkatan kapasitas institusi pendidikan tersebut. Dengan status Universitas, Muhammadiyah dapat mengelola berbagai unit usaha yang berkaitan langsung dengan pendidikan, seperti penyelenggaraan kursus, pelatihan, penerbitan buku, dan layanan pendidikan lainnya. Pengelolaan keuangan yang baik dan adanya kelebihan dana memungkinkan Universitas untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia. Ketika Universitas memiliki kelebihan dana, mereka dapat melakukan diversifikasi usaha ke bidang lain seperti kesehatan dan bisnis.

Bidang kesehatan bisa berupa pendirian rumah sakit, klinik, atau pusat layanan kesehatan yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai tempat praktik dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Bidang bisnis lainnya dapat mencakup usaha di sektor properti, teknologi, perdagangan, dan lain-lain yang dapat mendukung keberlanjutan finansial institusi.

Diversifikasi usaha membantu Universitas untuk mandiri secara finansial, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan visi dan misi pendidikan dapat mengalihkan fokus utama Universitas. Oleh karena itu, manajemen yang profesional dan transparan sangat diperlukan.

Perkembangan Muhammadiyah menjadi universitas membuka peluang besar untuk memperluas kontribusi dalam dunia pendidikan dan sektor usaha lainnya. Dengan pengelolaan yang tepat, Universitas tidak hanya menjadi pusat



an berkualitas tetapi juga institusi yang mandiri dan berkontribusi luas pembangunan sosial dan ekonomi. Data pada gambar menunjukkan

bahwa terjadi perkembangan yang cukup signifikan selama 5 Tahun terakhir dalam dunia Pendidikan. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2022 yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun diantaranya mulai Tahun 2018 sebanyak 48, Tahun 2019 sebanyak 52, Tahun 2020 sebanyak 60, Tahun 2021 sebanyak 66, Tahun 2022 sebanyak 82 mengalami perkembangan pesat selama 5 tahun terakhir.



Sumber : www.muhammadiyah.or.id (2023)

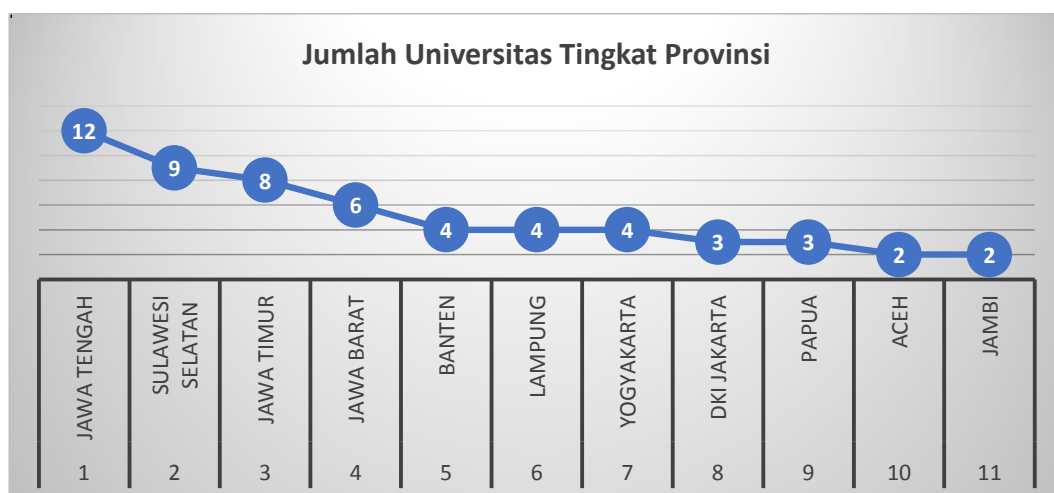
Gambar 1.1
Jumlah Universitas Muhammadiyah di Indonesia

Perkembangan tersebut membuktikan bahwa eksistensi Muhammadiyah sangat kuat, bahkan ketika terjadi masa krisis seperti *Covid 19* pada Tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian di seluruh sektor organisasi baik *profit* dan *nonprofit*, namun berbeda dengan Muhammadiyah yang mampu bertahan di Tengah krisis *Covid* karena memiliki kesiapan mengatasi masalah tersebut, disamping itu Muhammadiyah memiliki berbagai lini Amal Usaha yang dapat saling menopang satu sama lain (Hadi, 2019; Hidayat dan Hudaidah, 2021; Ihsan, 2022; Lokseumawe, 2020).

Hal ini membuktikan bahwa Muhammadiyah bisa bertahan dan berhasil mengadakan peralihan/*merger* menjadi tingkat Universitas dan atkan sumber daya manusia melalui tenaga dosen dan karyawan hingga



mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang akan membentuk karakter sumber daya manusia sehingga mendukung keberlanjutan usaha Muhammadiyah. Jika dilihat jumlah Universitas terbanyak di 30 Provinsi tersebar di Indonesia maka dikelompokkan 10 terbanyak jumlah Universitas tingkat Provinsi dan memilih jumlah terbanyak ke dua yaitu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan memiliki tingkat kedua terbanyak untuk ukuran jumlah Universitas terbanyak yaitu ada 9 wilayah tersebar diantaranya : Bulukumba, Bone, Sidrap, Sinjai, Enrekang, Sidrap, Palopo, Ahmad Dahlan Sinjai, dan Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar dijadikan salah satu contoh bagi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah menuju unggul, salah satu bentuk keberlanjutan Muhammadiyah makassar dapat dilihat dari dunia pendidikan, kesehatan dalam bentuk pendirian rumah sakit dan bisnis yang dijalankan yaitu usaha air minum Muhammadiyah, peternakan dan kegiatan kegamaan lainnya yang membentuk karakter Muhammadiyah.



Sumber : www.or.id (2023)

Gambar 1.2
Jumlah Universitas Tingkat Provinsi



Secara nasional Muhammadiyah memiliki Universitas yang tersebar di Indonesia. Data pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Universitas

Muhammadiyah tersebar di 11 Provinsi dan Provinsi yang terbanyak terpusat pada Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan sementara Provinsi lainnya hanya terdapat beberapa Universitas, hal ini menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah mengalami perkembangan pesat di pusat Ibu Kota yaitu Pulau Jawa disamping itu Universitas Muhammadiyah juga mengalami perkembangan pesat di kawasan timur Indonesia hal itu ditunjukkan pada Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di peringkat ke dua yang memiliki 9 Universitas. Hal tersebut menjadi motivasi dalam penelitian ini untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana proses keberlanjutan yang dilakukan pada Universitas Muhammadiyah khususnya di Sulawesi Selatan dan Universitas yang menjadi contoh di Indonesia Timur yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan demikian, alasan pemilihan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai lokus penelitian karena Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi islam sosial kemasyarakatan yang memiliki motivasi kuat untuk mengadopsi akuntansi keberlanjutan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai islam dan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan peneliti dengan penelitian lainnya terkait konsep akuntansi keberlanjutan dengan menggunakan pendekatan religius, dimana untuk mendukung akuntansi keberlanjutan di dalam suatu organisasi Muhammadiyah dengan menerapkan indikator GRI yang fokus pada kegiatan *People* (masyarakat) yang dijadikan rujukan sebagai salah satu hal untuk dilaksanakan di dalam suatu organisasi di dalam mendukung keberlanjutan dan mampu bertahan di masa yang akan datang.

Konsep yang ditawarkan oleh John Elkington menghadirkan konsep *people*, konsep *planet*, dan konsep *profit*, sedangkan penelitian ini akan konsep akuntansi keberlanjutan dengan konsep pada aspek lain *benefit*. Konsep ini dijadikan salah satu melaksanakan kegiatan



usaha atau bisnis dan ada *benefit* yang akan dihasilkan dan sejalan dengan cita-cita Kyai Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah untuk menuntaskan kemiskinan dan kebodohan melalui suatu organisasi yang tidak hanya paham dalam bentuk akademik tetapi paham tentang agama sehingga usaha akan tetap stabil ketika diikuti dengan sisi agama, sehingga indikator yang dijadikan rujukan oleh peneliti untuk mendukung suatu organisasi baik *profit* dan *non profit* untuk bisa berkelanjutan di dalam menjalankan suatu bisnis/usaha yaitu dengan menghadirkan di dalam suatu organisasi dengan melaksanakan beberapa indikator keberlanjutan diantaranya: *People* dengan mengaitkan fatwa Muhammadiyah/ nilai-nilai Muhammadiyah.

Konsep religious dan *benefit* dijadikan salah satu peluang untuk meningkatkan penerapan akuntansi keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan di dalam operasi bisnis, perusahaan dapat menemukan sebuah solusi atau cara untuk menciptakan sebuah nilai atau pembedah dengan usaha lainnya, sehingga dapat meningkatkan reputasi di mata konsumen ataupun investor dan akan berdampak tingkat keberlanjutan di masa yang akan datang.

1.2 Fokus Penelitian

Penjelasan yang diutarakan pada bagian pendahuluan menunjukkan bahwa dengan mengaitkan pemikiran *Triple Bottom Line* dan menambahkan nilai Religius dan *Benefit* untuk mendukung keberlanjutan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan. Pemetaan Provinsi yang dilakukan sehingga memilih Sulawesi Selatan sebagai peringkat ke dua

< dari 30 Provinsi pendirian Universitas terbanyak sebagai objek
 1. Permasalahan yang terjadi bagaimana mengungkapkan suatu



akuntansi keberlanjutan pada organisasi dalam lingkup Muhammadiyah dengan membawa konsep ekonomi, sosial dan lingkungan hingga religius dalam mencapai keberlanjutan.

Konteks keberlanjutan yang dimaksud adalah dengan mengambil aktivitas atau kegiatan yang dijalankan di suatu organisasi dengan mengabaikan kapitalisme dan memasukkan nilai-nilai Muammalah dengan memasukkan kegiatan sosial, hal itu bisa dilihat dengan mengaitkan indikator GRI -*People* dengan fatwa Muhammadiyah/nilai-nilai islam yang merupakan bentuk keberlanjutan dalam suatu organisasi dan akan melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban akibat kegiatan yang dilaksanakan dan bentuk keberlanjutan sehingga bisa bertahan sampai saat ini.

Salah satu keberlanjutan Muhammadiyah dilihat dari suatu organisasi yang mampu bertahan karena Amal Usaha Muhammadiyah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Salah satu bentuk AUM yang dibentuk dalam bentuk unit bisnis lainnya dan membantu anggota lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesama persyarikatan Muhammadiyah. Untuk mendukung hal ini diperlukan semangat, spirit, kolaborasi, paham digital dari anggota Muhammadiyah untuk membantu mewujudkan tujuan Muhammadiyah dalam bentuk memiliki sebuah nilai filosofi Muhammadiyah yaitu “hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan pernah mencari hidup di Muhammadiyah”. Makna dari filosofi ini mengajarkan untuk membentuk sebuah karakter, pengalaman, kekuatan untuk mendirikan suatu organisasi yang berkelanjutan dan dengan hal ini pastinya persyarikatan lainnya akan mengalami berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung dan menguatkan akuntansi keberlanjutan dengan mengaitkan konsep *triple*

ine dan religius di dalam organisasi Muhammadiyah dan dijadikan



rujukan bagi organisasi lainnya khususnya dalam bidang keberlanjutan di dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian dapat diuraikan atau dirumuskan melalui pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana konstruksi model akuntansi keberlanjutan berbasis nilai-nilai religious pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi model akuntansi keberlanjutan berbasis nilai-nilai religious pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai konsep keberlanjutan berdasarkan pendekatan *triple bottom line* dengan mengintegrasikan indikator GRI yang menitikberatkan pada aspek sosial. Aspek sosial yang dikaji tidak hanya terbatas pada dimensi sosial konvensional, tetapi juga melibatkan konsep religiusitas dan manfaat (*benefit*). Aspek religiusitas dianggap sebagai elemen sosial yang memiliki peranan signifikan dalam pelaksanaan dan implementasi di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada organisasi baik *profit* dan *nonprofit*. Akuntansi keberlanjutan berbasis religius dan benefit dapat diterapkan organisasi lain



untuk menunjang kelangsungan aktivitas sebuah organisasi, seperti yang sudah di alami Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Salah satu indikator yang digunakan dengan mengaitkan Indikator GRI yang berfokus pada kegiatan sosial, merupakan pendukung aktivitas keberlanjutan yang dapat diterapkan oleh organisasi lain untuk meningkatkan kapasitas yang tidak hanya mengutamakan kepentingan finansial organisasi itu sendiri tetapi juga bagi semua anggota yang ada di dalam organisasi (*benefit*).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disajikan sebagai berikut :

- a. Bab satu membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
- b. Bab dua membahas konteks akuntansi keberlanjutan, konteks organisasi *non profit*, amal usaha Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- c. Bab tiga membahas metodologi penelitian.
- d. Bab empat menjelaskan koreksi pilar sosial dalam akuntansi keberlanjutan: tinjauan normatif terhadap eksistensi akuntansi sosial berdasarkan konsep GRI.
- e. Bab lima menjelaskan masalah koreksi pilar sosial pada akuntansi keberlanjutan: pendekatan normatif untuk perbaikan.
- f. Bab enam menjelaskan praktik akuntansi keberlanjutan dan koreksi pilar sosial: sebuah tinjauan normatif.
- g. Bab tujuh menjelaskan kebutuhan konsep baru akuntansi keberlanjutan terkait aspek sosial: sebuah tinjauan normatif atas koreksi pilar sosial.



- h. Bab delapan menjelaskan dekontruksi akuntansi keberlanjutan Dalam Perpektif Tasawuf Muhammadiyah: Pendekatan Postmodern Terhadap Pilar Sosial GRI.
- i. Bab sembilan menjelaskan penutup yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Keberlanjutan

Akuntansi Keberlanjutan pertama kali muncul pada Tahun 1972 oleh Konferensi PBB tentang Lingkungan, serta diteruskan dan di deklarasikan sebagai agenda internasional pada Tahun 1987 oleh *World Commission on Enviromental and Development* (WCED). Sehingga konsep tersebut memiliki peranan penting dan menarik perhatian banyak bagi disiplin ilmu khususnya di bidang akuntansi yang dapat ditelusuri berbagai karya Elkington (1997) dengan konsep *Triple Bottom Line* (Sudana dkk, 2014). Kegiatan manusia tidak terlepas dari kegiatan bisnis yang memiliki dampak pada lingkungan dan sosial. Manusia membutuhkan alam untuk menjalankan keinginannya, begitupun pada bisnis membutuhkan sumber daya untuk menjalankan aktivitasnya sehingga prinsip keberlanjutan dikaitkan dengan kegiatan operasional yang dilakukan di suatu organisasi.

Pada dasarnya setiap organisasi menginginkan keuntungan dalam menjalankan bisnis dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kepentingan internal maupun eksternal. Oleh karena itu dengan menerapkan prinsip keberlanjutan di dalam suatu bisnis akan membuat bisnis bertahan lama. Beberapa contoh perusahaan yang menerapkan keberlanjutan, misalnya Coca-Cola dengan kegiatan produksi negatif pengelolaan air dan menjamin untuk penduduk sekitar tidak terkena dampak sehingga tidak terjadi pengeluaran lebih besar ketika ada penyalagunaan pengelolaan bisnis yang dijalankan. Produk

ah satu *fashion* yang ternama, dimana telah berkomitmen memproduksi yang ramah lingkungan, hal itu dibuktikan dengan mengelola limbah



garmen yang tidak mengotori lingkungan (Adhariani, 2021). Kegiatan dengan memperhatikan lingkungan dalam suatu usaha tentunya mengeluarkan biaya yang cukup besar, tetapi bukan berarti Perusahaan kecil tidak bisa menerapkan prinsip keberlanjutan, hal yang bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah dan sampah, memberdayakan penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai karyawan dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat harus memikirkan bahwa perekonomian sebuah negara tidak beroperasi dengan semestinya dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Dampak manusia saat ini pada sistem lingkungan yang diabaikan akibat adanya keserakahan manusia yang menghabiskan sumber daya yang dimiliki baik dalam bentuk batubara, minyak dan gas yang telah menyebabkan terjadinya revolusi industri dan peradaban moderen. Manusia telah mengurangi persediaan air tawar, tanah yang subur, *stock* ikan dan keanekaragaman hayati juga menurun, polusi udara yang memburuk, serta berbagai produk ramah lingkungan yang semakin langka ditemukan. Sehingga hal ini menyadarkan bagi kita semua bahwa keberlanjutan sebagai tujuan dan pengelolaan lingkungan yang diinginkan dan dijadikan inspirasi untuk menciptakan dunia berkelanjutan (Razak, 2023; Sukaharsono dan Andayani, 2021).

Akuntansi keberlanjutan lebih terkenal dikenal di dunia yaitu "*sustainability accounting*". *Sustainability Accounting Standard Board* (SASB) merupakan badan yang mengeluarkan standar akuntansi keberlanjutan yang menyatakan bahwa keberlanjutan mengacu pada kegiatan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan entitas untuk menciptakan nilai positif atau nilai yang panjang, sehingga akuntansi keberlanjutan dipicu dengan adanya



pengukuran manajemen, pelaporan kegiatan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial dan lingkungan serta dampak dari ekonomi.

SASB ini juga diperuntukkan untuk organisasi nirlaba independen untuk mengungkapkan informasi lingkungan, sosial, tata kelola kepada investor dengan tujuan untuk membantu perusahaan secara publik, melaporkan informasi yang konsisten sehingga mampu mengelola masalah terkait perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, inovasi teknologi, pertumbuhan populasi. Sehingga dengan adanya informasi ini investor dapat mengarahkan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan untuk jangka panjang (Hales, 2021).

Akuntansi keberlanjutan memberikan manfaat di masa yang akan datang dengan menggunakan model akuntansi keuangan secara tradisional dengan menambahkan transaksi usaha ke harga pasar untuk pajak lingkungan, sehingga membutuhkan sumber daya yang paham untuk mengelola pelaporan berkelanjutan dengan memasukkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan usaha di masa yang akan datang (Adams dan Larrinaga-González, 2007; Lamberton, 2005).

Safi dkk (2023) mengatakan dengan adanya konsep akuntansi keberlanjutan dapat meningkatkan kesadaran manajemen untuk memenuhi persyaratan bagi pihak investor dalam melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan. Keberlanjutan usaha sangatlah penting, karena tujuan di dalam organisasi menghasilkan laba yang maksimal agar kelangsungan hidup bisa dipertahankan, maka dibentuk sebuah strategi dan kebijakan sehingga mampu bersaing dan tetap eksis dengan perkembangan zaman yang berbeda setiap tahun dan hal itu bisa dibuktikan dengan mampu bertahan lama dalam ahankan kelangsungan usahanya (Sukaharsono dan Andayani, 2021).



Untuk mendukung keberlanjutan di dalam suatu organisasi dilakukan beberapa metode diantaranya metode *Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU)* dan *Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (Stars System)*, dimana metode ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan keberlanjutan usaha dilihat dari hasil kinerja sosial yang baik, serta sebagai alat pengukuran kinerja berkelanjutan, sebagai komunikasi yang efektif untuk membangun reputasi positif bagi entitas, menggambarkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta dijadikan sebuah landasan untuk pertumbuhan bisnis yang responsif terhadap perubahan pasar dan tantangan di masa depan (Juniarti, 2023; Kurniawan dan Wahyuni, 2019). Selain itu terdapat juga beberapa penelitian yang mengabaikan praktik keberlanjutan di dalam sebuah organisasi.

Tiwari dan Khan (2020) menyatakan bahwa penerapan akuntansi keberlanjutan belum optimal karena keterbatasan pemahaman sumber daya manusia yang menguasai perubahan, khususnya terkait dengan teknologi Industri 4.0. Integrasi pemahaman teknologi industri dalam upaya menuju keberlanjutan usaha menjadi sebuah perdebatan yang kompleks, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: waktu implementasi yang relatif lama, biaya yang signifikan, kebutuhan akan penambahan sumber daya manusia yang kompeten, serta pengeluaran yang diperlukan untuk pelatihan karyawan dalam bidang sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Ozili (2022b) dan Wahyuni (2023) mengatakan untuk mendorong keberlanjutan usaha dengan berinvestasi bukan hanya berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan, tetapi sumber daya manusia dengan mengikutkan terkait bidang usaha, sehingga akan berdampak pada keberlanjutan pendekatan yang berbeda dikemukakan dengan menambahkan dua



konsep, yaitu konsep prophet/spiritual dan fenoteknologi, sebagai upaya mendukung keberlanjutan dalam usaha. Selain itu, penekanan juga diberikan pada pentingnya peran tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus di bidang keberlanjutan (Aziza dan Sukoharsono, 2021).

Isu akuntansi keberlanjutan yang sudah kita lihat yang dimulai adanya aktivitas bisnis yang merusak ekosistem dan mengabaikan kegiatan sosial salah satu dampak usaha tidak berkelanjutan. Salah satu cara untuk melihat permasalahan dari sudut jangka panjang untuk memastikan kegiatan ekonomi berkelanjutan secara sosial dan lingkungan, sedangkan dilihat dari jangka pendeknya pertumbuhan ekonomi akan terjadi tetapi berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan. Dalam pernyataan publik mengenai kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan mengatakan organisasi mengklaim bahwa mengakui tanggung jawab sosial dan lingkungan dan berupaya untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan dengan cara yang tepat, tetapi banyak yang mengkritik bahwa beberapa bisnis yang hanya menggunakan teknik akuntansi keberlanjutan sebagai alat untuk hubungan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan yang dukungannya sangat penting untuk kelangsungan profitabilitas bisnis (de Villiers dkk. 2017; Laine dkk, 2021; Zyznarska dan Dworzak, 2020).

Organisasi bisnis pada umumnya memberikan kontribusi pada ekonomi dan kehidupan secara umum, hal itu dilihat dari keputusan bisnis yang melibatkan masalah sosial dan lingkungan yang menjadi hal yang harus difikirkan bagi semua organisasi. Dimensi ekonomi pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri melainkan melibatkan dimensi sosial dan lingkungan menjadi salah satu faktor



ilan ekonomi, konsep ini biasa kita kenal dengan konsep *Triple bottom*). Konsep TBL sebagai respons dari manusia moderen yang

berkaitan dengan keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. TBL sebagai pemikiran tentang *sustainability* pertama kali digunakan oleh John Elkington, namun latar belakang gagasan ini sudah ada sejak sekitar 130 tahun lampau. Gagasan tentang pelestarian lingkungan semakin terkenal seiring dengan munculnya pembangunan berkelanjutan dalam sebuah laporan “*Bruntland Report*” Tahun 1987, dimana TBL menyediakan sebuah kerangka kerja untuk mengukur kinerja sebuah bisnis dan keberhasilan sebuah organisasi dengan menggunakan parameter: ekonomi, sosial dan lingkungan. Tiga parameter ini dalam literatur Elkington disebut sebagai *profit*, *people*, dan *planet* (laba, manusia dan lingkungan) (Elkington, 2013; Sukaharsono dan Andayani, 2021).

Dengan adanya konsep TBL ini dijadikan entitas untuk meningkatkan pengungkapan standar audit, kesadaran yang ingin dicapai entitas, keunggulan kompetitif, mengukur efisiensi, tanggung jawab sosial, sedangkan dalam penelitian ini mengatakan hal lain bahwa terbukti pengungkapan TBL masih buruk dan membutuhkan tindak lanjut dan pemantauan dalam organisasi untuk bisa menerapkan konsep tersebut sehingga bisa mencapai keberlanjutan usaha (Safi dkk, 2023). Solovida dan Latan (2021) mengatakan bahwa akuntabilitas dapat dijadikan sebagai pusat informasi untuk menerapkan konsep TBL sehingga dibutuhkan pengawas lingkungan untuk memastikan diterapkan konsep keberlanjutan. Sukaharsono dan Andayani (2021) menawarkan beberapa aspek agar organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dimana harus seimbang, diantaranya:

2.1.1. Konsep *Profit*



*Makna dari *profit* kebanyakan para pelaku usaha mengartikan yang salah kelangsungan suatu bisnis dinilai dengan semakin meningkatnya

keuntungan di dalam organisasi. *Profit* dan mengalami pertumbuhan dalam usaha merupakan indikator keberhasilan dan terkadang bertolak belakang. Jika diperhatikan kembali dari segi pengeluaran, *omset* apakah mengalami kenaikan atau penurunan, dan jika dilihat dari sisi modal apakah modal yang dikeluarkan bertambah atau *stagnan* atau tidak berputar kembali, apakah jumlah pelanggan naik atau malah berkurang, dan apakah biaya operasional meningkat, maka hal ini perlu dipertimbangkan, apa makna dari kata *profit* dan pertumbuhan usaha.

Profit dan pertumbuhan ini merupakan faktor yang sangat penting di dalam suatu organisasi, hal ini dibuktikan dengan adanya usaha-usaha yang sulit melakukan pertumbuhan, dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi pada umumnya pertumbuhan sulit didapat tanpa adanya *profit*, sedangkan *profit* menjadi salah satu indikator pertumbuhan. Pada dasarnya *profit* bukan hanya fokus mencari keuntungan, tetapi bagaimana upaya untuk menciptakan *fair trade* atau *ethical trade* (praktik bisnis yang benar dan beretika).

Wardokhi dkk (2023a) mengungkapkan konsep *profit* yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan ekonomi menjaga agar keberlanjutan bisnis bisa berjalan dalam menjual produk sesuai dengan harga bahan baku yang diperoleh sehingga mendapatkan keuntungan, melakukan penghematan biaya operasional dengan cara mencari biaya bahan baku yang termurah, serta menyediakan kontrakan untuk karyawan, melakukan perputaran uang dalam bentuk investasi ke peralatan, menciptakan keunggulan produk dan pelanggan. Untuk mengungkapkan konsep dijalankan yang ada di atas, maka diperlukan mengalokasikan sumber daya yang paham terkait proses berkelanjutan dalam bisnis (Chinyonga dan Mwanza, 2024; Dwi Astuti dkk, 2023; Lamberton, 2005;



:2b).

Profit menjadi salah satu alasan membuat manusia bersifat egois dan menginginkan sesuatu dan menghalalkan segala cara hingga merampas yang bukan haknya. Seperti diketahui dunia sedang menghadapi tantangan peperangan, kemiskinan, ketidakadilan, mengabaikan lingkungan serta perubahan iklim. Tantangan ini bahkan mendiskriminasi umat manusia dan untuk melakukan pembrantasan ini dengan adanya interaksi PBB dan perlu adanya akuntansi keberlanjutan dan *green economic* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengatasi berbagai kebutuhan sosial dan isu perubahan lingkungan dan iklim (Denhere, 2022). Judijanto dkk (2024) lebih penekanan peran inovasi keuangan dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan pentingnya akuntansi keberlanjutan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Kraten (2014) mengatakan dengan membangun suatu usaha maka dibutuhkan pengelolaan agar prosesnya tidak terkena dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dapat membantu untuk memperbaiki perekonomian dengan terbukanya lapangan pekerjaan, perbaikan jalanan, dan kegiatan sosial lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Sehingga dengan melakukan kegiatan keberlanjutan akan tercapai kesuksesan ekonomi, diantaranya: memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada organisasi itu sendiri maupun *stakeholder* yang terkait.

Adanya program ini diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat. Sesuai dengan cita-cita Kiyai Ahmad Dahlan yang membentuk suatu organisasi yang dijalankan yaitu Muhammadiyah



mbrantas kemiskinan dan kebodohan hingga mendirikan usaha yang nya paham dalam bidang akademik tetapi bidang agama dan ini

merupakan salah satu ciri Muhammadiyah yang tetap eksis dalam usahanya dan mampu bertahan sampai saat ini dan ingin menciptakan Muhammadiyah tidak akan mati di masa yang akan datang (Muhammadiyah, 2022; dan Nashir, 2022).

2.1.2. Konsep *People*

Pada dasarnya suatu organisasi menyadari bahwa masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* yang penting bagi organisasi karena dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Organisasi seharusnya berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial organisasi didasarkan pada keputusan organisasi tersebut dan tidak bersifat paksaan atau tuntutan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan sosial yang dilakukan organisasi maka dapat dikatakan investasi masa depan dan timbal balik masyarakat juga akan ikut serta menjaga kelangsungan organisasi. Misalnya pemberian beasiswa bagi para mahasiswa atau siswa atau daerah, pemberian sumbangan dalam bentuk keagamaan, buku baca atau kesehatan serta penguatan kapasitas ekonomi lokal dalam bentuk perbaikan jalanan dan pembangunan daerah.

Wardokhi dkk (2023a) dalam penelitiannya telah melaksanakan kegiatan sosial dengan memperhatikan hak asasi manusia dengan memberikan haknya kepada karyawan sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam bentuk pemberian gaji secara layak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), pemberian bonus, memasukkan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, serta memberikan lingkungan yang nyaman dalam dunia kerja, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat lokal dalam bentuk pemberian zakat, santunan ke-
uhan, serta memberikan bantuan sosial lainnya. Sehingga hal ini
an langkah yang sangat bagus dalam mendukung keberlanjutan usaha



dan kontribusi positif untuk masyarakat lokal. Iswanu, Puspita Arimbawani (2022); dan Sukoharsono (2022) menjelaskan konsep *people* yang dimaksud bagaimana menciptakan tanggungjawab pegawai terkait pekerjaan, proses penilaian, prasktek kedisiplinan, dan tidak ada deskriminasi sesama pegawai.

Di dalam suatu organisasi, untuk memahami konteks keberlanjutan dari sisi *people* maka organisasi diperlukan untuk mengidentifikasi sebuah peran akuntansi yang memiliki pemahaman terkait sistem akuntansi dan manajemen yang dapat mengurangi dampak negatif keberlanjutan (Adams dan Larrinaga-González, 2007). Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, peran pendidik menjadi sangat penting dalam memahami dinamika perubahan organisasi melalui penerapan akuntansi keberlanjutan. Pendidik perlu terdorong untuk mengembangkan pemikiran strategis dalam membentuk keberlanjutan di sektor pendidikan dengan menciptakan pengetahuan yang mendalam di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Selain itu, penting pula untuk mengintegrasikan pengungkapan informasi tersebut ke dalam bentuk pelaporan yang transparan dan akuntabel (Gray, 2019; Powell dan McGuigan, 2023; Tran & Herzig, 2023; Wong dkk, 2021). Al-Hazaima dkk (2021) menjelaskan bahwa terdapat kekhawatiran bahwa peran akuntansi tidak akan terpakai dalam dunia organisasi sehingga dalam dunia pendidikan tidak memasukkan dalam kurikulum terkait akuntansi sosial dan lingkungan, seperti yang dilakukan di Universitas Yordania yang mengabaikan peran ini yang akan berdampak di masa yang akan datang bahwa aspek ini sangat penting dalam mencapai keberlanjutan usaha dengan memahami aspek-aspek penting yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan.

Literasi pemahaman tersebut memiliki manfaat agar masyarakat sendiri



ini menjaga lingkungan dan melakukan kegiatan sosial serta di
an ketika bekerja di organisasi yang belum memahami informasi

pentingnya keberlanjutan dalam dunia usaha (Ahmad dkk, 2023). Hal lain bisa dilakukan dengan cara merenungkan secara kritis dan sama-sama memiliki tanggung jawab sebagai akademisi, pendidik, dan kolega secara individu maupun anggota komunitas yang memiliki tujuan *sportif* dalam memfasilitasi dunia yang berkelanjutan dengan menstimulasi dan memfasilitasi dialog serta perdebatan dalam memajukan transisi dunia yang lebih berkelanjutan secara lebih efektif (Correa Ruiz dkk, 2023). Caron dan Fortin (2023) sebaiknya mendekonstruksi sumber daya teknis profesional untuk melihat bagaimana suatu profesi dapat berkontribusi pada proses perubahan masyarakat. Maka perlu digaris bawahi pentingnya keterampilan di tempat kerja yang diperlukan memberikan pelatihan baik yang berhubungan dengan pekerjaan dan *non* pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan digital (Othman dan Ameer, 2024).

Proses perbaikan dalam bentuk sumber daya manusia di dunia pendidikan, dapat membantu proses keberlanjutan dalam suatu organisasi. Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Kehadiran ini diharapkan dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat sekitarnya dalam bentuk perekrutan tenaga kerja serta sumbangsih secara langsung oleh perusahaan terhadap masyarakat, sehingga membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatannya. *Sustainability* ini diupayakan dengan cara mendukung kesehatan masyarakat, pembangunan kawasan suatu negara, serta penegakan hak asasi manusia dan melakukan persaingan usaha yang sehat sehingga berdampak pada keberlanjutan di dalam suatu organisasi

sono dan Andayani, 2021).



Selain itu juga dibutuhkan tenaga professional atau tenaga akuntan untuk bisa memperdalam *skill* yang dimiliki dalam bentuk pemahaman akuntansi keberlanjutan. Audito dkk (2023) mengungkapkan bahwa dengan adanya ilmu yang paham akan berdampak kepada para pemangku kepentingan untuk lebih memahami begitu penting menerapkan keilmuan akuntansi keberlanjutan bersama-sama untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya keilmuan ini berperan untuk menyajikan tidak hanya sisi tanggung jawab keuangannya saja, tetapi dari sisi tanggung jawab *non* keuangan yang akan disajikan kepada pemegang saham. Adapun indikator telah diterapkan akuntansi keberlanjutan yaitu: menerapkan *teamwork* antar karyawan, kegiatan sosial sudah efektif terlaksana, hingga dampak ekonomi sudah efektif hal itu ditandai dengan cara perusahaan membantu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat UMKM.

Organisasi Muhammadiyah telah melakukan berbagai kegiatan sosial yang signifikan untuk mendukung keberlanjutan dalam dunia usaha, baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah: (Muhammadiyah, 2025; Nashir, 2025; Rahmadanti dkk, 2025).

a. Pengembangan Kewirausahaan Sosial

Muhammadiyah menjadi pelopor Gerakan kewirausahaan sosial di Indonesia sejak awal berdirinya. Organisasi ini mengembangkan berbagai amal usaha yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Hal itu bisa dilihat dari Muhammadiyah memiliki 167 Perguruan tinggi, 126 rumah sakit dan ratusan klinik yang tersebar di seluruh

Asia. Ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam membangun masyarakat yang lebih berpendidikan, sehat dan Sejahtera.



b. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Sektor Swasta

Muhammadiyah bekerja sama dengan Pemerintah dan Sektor Swasta untuk mengakses program-program bantuan modal, pelatihan serta sertifikasi usaha kecil. Ini dilakukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha-usaha kecil yang dibina oleh Muhammadiyah. Ini termasuk pelatihan *e-commerce*, penggunaan media sosial untuk promosi, serta manajemen keuangan berbasis aplikasi, hingga melakukan pelatihan dalam bidang *English* untuk mendukung sumber daya manusia yang dimiliki dalam dunia Pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah lainnya.

c. Keterlibatan Masyarakat dan Gotong Royong

Muhammadiyah menekankan pentingnya keterlibatan Masyarakat dan prinsip gotong royong dalam model bisnisnya. Ini membantu menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pembedayaan Masyarakat.

d. Fokus pada Keberlanjutan Lingkungan

Muhammadiyah berkomitmen mengelola usaha yang berfokus pada kesejahteraan Masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ini tercermin dalam berbagai program yang tidak hanya mengejar keuntungan materi tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Ini termasuk Upaya pencegahan dan pengelolaan risiko lingkungan, serta mengutamakan keadilan bagi pekerja dan Masyarakat sekitar.

Dengan demikian, kegiatan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, sehingga menciptakan keberlanjutan yang holistik dan

utan dalam dunia usaha.



2.1.3. Konsep *Planet*

Dalam suatu organisasi ketika mengoperasikan tentunya selalu bersentuhan dengan alam. Seperti kita ketahui bahwa sumber daya alam semakin terbatas dan sering kali tidak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas dalam mengumpulkan harta yang biasa kita kenal dengan kapitalisme. Berbagai usaha yang harus dijalankan dan menuntut agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam tidak boleh menimbulkan kerusakan dan harus diiringi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Filosofinya yaitu apa yang ada di alam ini sifatnya beribadah dengan cara mengingat Allah dan apa yang ada di langit dan di bumi dengan mengembangkan sayapnya serta sudah mengetahui apa yang kita kerjakan sesuai dengan isi surat QS An Nur (24):41. Adapun makna yang tersirat bahwa islam adalah agama yang ramah dengan lingkungan, serta mengajarkan kita agar memanfaatkan dan mengelola alam dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlangsungannya dengan damai dan nyaman serta sejahtera (Sukaharsono dan Andayani, 2021).

Wardokhi dkk (2023a) mengungkapkan yang dilakukan dalam menghargai lingkungan dengan menerapkan proses penanganan limbah dengan menyediakan tempat sampah dan memungut iuran serta menciptakan lingkungan yang bersih dan berkontribusi pada konsep pelestarian lingkungan. Iswanu, Puspita Arimbawani (2022); dan Sukoharsono (2022) belum menerapkan ramah lingkungan yang masih menggunakan bahan kertas dan mengabaikan digital dengan alasan karena masih memerlukan sistem pengarsipan, tetapi untuk mendukung *green accounting* dengan mengurangi



sertas dengan tingkah ph 7 dan menjaga dengan melakukan bentuk
i penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup sehingga terbentuknya penanganan permasalahan lingkungan.

Konteks keberlanjutan dengan memperhatikan lingkungan akan berdampak pada kesuksesan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berlangsung selalu berdampak pada menurunnya fungsi lingkungan hidup dan daya tahan, pembangunan yang berorientasi dalam mengejar pertumbuhan sering kali mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat malah menjadi perusak sistem penunjang lingkungan hidup. Pembangunan harus berjalan dengan tidak melupakan pengelolaan lingkungan hidup, secara umum pembangunan yang berkelanjutan bertumpu pada ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup tetapi perlu adanya wawasan terkait pembangunan yang ramah lingkungan hidup. Pembangunan lingkungan merupakan salah satu pilar yang dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan yang merupakan jantung seluruh kehidupan. Adapun pilar yang dimaksud diantaranya: air bersih, sanitasi layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan (Audito dkk, 2023).

Green accounting dan keberlanjutan merupakan kunci dalam memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Septiani, 2017). Anggraini dkk (2024) menjelaskan bahwa akuntansi sosial dan lingkungan dijadikan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan dijadikan



suatu sistem informasi akuntansi yang menyediakan informasi mengenai lingkungan.

Green Accounting bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan yang akan berdampak pada keberlanjutan di masa yang akan datang. Kisnawati dkk (2018), dan Maricar dan Priyawan (2024) dalam penelitiannya telah menerapkan akuntansi lingkungan melalui pengelolaan limbah dan produk yang dihasilkan, namun dari segi pencatatan belum membentuk akun terpisah sehingga belum bisa mengetahui yang mana kategori biaya lingkungan atau *non* lingkungan. Pandin dkk (2023) mengungkapkan telah menerapkan dengan cara mengurangi penggunaan kemasan plastik, menggunakan kemasan daur ulang, inovasi kemasan, penggunaan alat daur ulang. Oktariyani (2024) telah melaksanakan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan limbah, pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) serta sebagai wacana untuk diberlakukan penggunaan standar *international Financial Reporting Standards* (IFRS).

Kesadaran lingkungan menjadi pertimbangan penting bagi pemilik bisnis saat ini, fokus saat ini bagi entitas adalah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan seperti penggunaan sumber daya lingkungan dan perumusan kebijakan pembuangan limbah dan hal ini merupakan tanggung jawab seorang tenaga ahli untuk mengungkapkan biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh bisnis dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan Perguruan Tinggi harus mempersiapkan lulusannya dan dibekali kompetensi terkait akuntansi keberlanjutan guna memenuhi kebutuhan pemahaman akuntansi berbasis lingkungan bagi seorang akuntan (Setiawan dkk, 2023).



2.1.4. Konsep *Prophet*

Prophet biasa dikenal dengan arti spiritualitas/religius dan mental atau keseimbangan spiritualitas untuk melestarikan kehidupan organisasi. Konsep ini merupakan sebagai gambaran dari pokok manusia yang beragama yakni bermuara pada penyerahan diri. Manusia menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Sebuah entitas harus menyadari praktik spiritualitas, mulai dari pengungkapan kesadaran tuhan, kesadaran transendental, kejujuran kemampuan kontemplasi diri dan cinta yang tulus.

Wardokhi dkk (2023a) mengatakan bahwa *prophet* yang dimaksud terdapat beberapa item: pertama, pengakuan ketergantungan manusia pada penciptanya hal ini bisa dilihat dengan mengatakan semuanya akan berhasil karena ada Allah yang bersamai kita, kedua: pengakuan adanya hubungan dan kesamaan antara tuhan dan manusia yang mengindikasikan bahwa transendensi melemahkan segala kekuasaan, kekayaan dan pengetahuan manusia, hal itu bisa dilihat bahwa institusi diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan dan diberikan hak untuk melaksanakan ibadah, ketiga: pengakuan akan keunggulan norma-norma mutlak yang melampaui pemahaman manusia.

Konsep *prophet* dikaitkan dari sisi akuntansi keberlanjutan dan pelaporan mempunyai tujuan dasar yaitu sebagai alat akuntabilitas dalam bentuk memperhatikan aspek tata kelola lingkungan, sosial dan organisasi, serta sebagai alat intropeksi diri, dimana tujuan tersebut semata untuk menimbun keuntungan untuk memenuhi kebutuhan, namun untuk mencapai tujuan sendiri dengan menerapkan prinsip-prinsip islam karena bisa memperhatikan aspek

dan lingkungan yang biasa disebut sebagai Muammalah (Cendika dan Idris, 2021).



Konsep ini memiliki manfaat yang berkelanjutan hingga ke akhirat karena menanamkan untuk saling membantu dan tidak hanya mengejar keuntungan semata. (Iswanu dan Sukoharsono, 2022) mengatakan konsep *prophet* mengajarkan untuk melakukan beberapa hal yang positif diantaranya: penerapan kasih yang tulus, penerapan kesadaran transendental, kejujuran dan kemampuan kontemplasi diri. Pada dasarnya setiap manusia yang sadar akan keberadaan tuhan pastinya akan selalu mempunyai batasan dalam melakukan suatu hal, *prophet* menjelaskan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab sesama manusia. Dalam penelitian ini sudah ditanamkan unsur *prophet* dengan efektifitas implementasi yang baik.

Dewi (2021b) mengatakan akuntansi keberlanjutan dengan memasukkan metode religius ekosentrisme diyakini dapat menyatukan pemikiran seluruh umat beragama di dunia, sehingga tidak ada kepentingan individu, kepentingan kelompok melainkan menjadi kepentingan bersama, jika metode ini dipraktikkan dengan baik, maka keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan bersama dapat terwujud menuju keberlanjutan alam semesta.

Sukoharsono (2021) juga memasukkan beberapa model baru terkait akuntansi keberlanjutan diantaranya dengan kewajiban hukum dengan menaati semua aturan, kewajiban ekonomi, bagaimana menciptakan suatu usaha untuk mempertahankan keuntungan yang jangka panjang, kewajiban filantropis, menjaga kelangsungan masyarakat dengan melakukan kegiatan sosial, kewajiban lingkungan hidup, dimana berkewajiban untuk melestarikan lingkungan, kewajiban ruhani dimana tanggung jawab kesadaran penuh terhadap internal, masyarakat, lingkungan hidup, negara dan tuhan. Beberapa penelitian



dukungan keberlanjutan usaha dengan menerapkan dimensi spiritual dan manfaat untuk mengingatkan dalam menjalankan tugas untuk berada

dijalan yang benar dan tidak merugikan pihak lain (Correa dkk, 2023; Der, 2020; Gallhofer dan Haslam, 2019; Manetti dkk, 2021; Molisa, 2011; Muslichah, 2018).

Sari (2021) mengungkapkan konsep *triple bottom line* dalam akuntansi moderen melakukan dekonstruksi spiritualitas dengan menggunakan pemikiran Tasawuf Hamka yang mengatakan akuntansi moderen telah digantikan dengan prinsip keadilan sosial yang berlandaskan pada ideologi yaitu hakikat alam, hakikat kehidupan, hakikat manusia yang hidup. Melalui konsep ini yang menggunakan akhlak, maka tanggung jawab sosial dibangun mencakup kesadaran akan tanggung jawab terhadap tuhan yang telah menyediakan bumi dan segala isinya untuk dikelola oleh manusia dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Kemudian konsep ini juga biasa dikenal sebagai konsep pencucian harta yang mengacu bahwa harta bukan milik manusia melainkan milik Tuhan yang dititipkan kepada manusia, dimana harta itu perlu adanya pencucian dengan cara menyerahkan bagian orang lain dari seluruh harta yang dimiliki. Akuntabilitas dalam pemikiran tasawuf hamka melibatkan nilai kegamaan dan nilai filantropis dan konsep tanggung jawab sosial dalam bentuk pelaporan. Efferin dan Hutomo (2021) mengungkapkan spiritualitas yang ada didunia kerja akan memberikan rasa kebahagiaan, kenyamanan dalam berkerja.

Kebahagiaan manusia sebenarnya adalah bertemu dengan Tuhan, maka sebaiknya manusia harus menjaga hubungan baik dengan Tuhan dengan menciptakan keseimbangan mental dan spiritual dalam proses pelestarian kehidupan suatu organisasi (Handayani, 2023).

2.1.5. Konsep *Pheno-Technology*



Phenotechnology merupakan salah satu bentuk fenomena yang terjadi dengan teknologi informasi dan memiliki peran penting dalam menjaga

kelangsungan hidup bagi suatu organisasi. Salah satu cara untuk bertahan dalam suatu organisasi untuk bisa bersaing dengan para kompetitornya adalah dengan menggunakan digital atau sistem informasi yang baik, untuk menggunakannya maka diperlukan pengeluaran investasi dalam bidang teknologi dan biasanya untuk menggunakannya harus mengeluarkan biaya yang besar. Dengan adanya peningkatan terbaru dalam bentuk sistem informasi, dapat mempermudah pekerjaan seseorang khususnya bidang akuntan dalam melakukan pekerjaannya dalam bentuk pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan, sosial dan lingkungan dalam bentuk laporan berkelanjutan yang dimasukkan dengan menggunakan teknologi akuntansi dalam bentuk *software* akuntansi, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan (Aziza dan Sukoharsono, 2021).

Wardokhi dkk (2023b) mengungkapkan dalam pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam mendukung keberlanjutan dengan memanfaatkan penggunaan media sosial seperti instagram, dan *platform e-commerce* seperti Tokopedia, *Shopee*, gojek, dan grab, ini menjadi sarana untuk memastikan menjangkau pasar yang luas dan usahanya akan lebih dikenal dan dijadikan alasan untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu usaha. Ganis Sukoharsono dkk (2021); Purnomo dkk (2023); Purnomosidi dan Sukoharsono (2022); Tiwari dan Khan (2020) menambahkan dalam penelitiannya untuk mencapai keberlanjutan dalam suatu organisasi dengan menggunakan teknologi seperti *e-commerce*, *hardware*, dan *software*, serta teknologi desain keberlanjutan.

Mengingat pentingnya peran teknologi dalam dunia bisnis, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang teknologi dan sistem

akuntansi. Oleh karena itu, pembelajaran di dunia pendidikan harus untuk membentuk sumber daya manusia yang memahami proses



keberlanjutan. Beberapa penelitian di perguruan tinggi telah mendorong pengembangan kurikulum mata kuliah akuntansi keberlanjutan yang mencakup pemahaman mendalam mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan profesi akuntan yang profesional dan kompeten dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (Kurniawan dan Wahyuni, 2019; dan Kurniawan Saputra dkk, 2024). Profesi akuntan sangat dibutuhkan untuk menciptakan dunia berkelanjutan, serta dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan serta alat evaluasi pembangunan berkelanjutan (Bebbington dkk, 2007; Bebbington dan Unerman, 2018; Gupta dan Gill, 2012). Peran akuntansi dalam memajukan pencapaian *sustainability accounting* melalui peningkatan pemahaman, kemajuan kebijakan, praktik dan teori akuntansi (Bebbington dan Unerman, 2018).

Karbekova dkk (2023); Liu dkk (2023); dan Värzaru (2022) mengatakan bahwa teknologi digital memiliki keterkaitan akuntansi dan pelaporan berkelanjutan serta budaya berorientasi keberlanjutan di negara-negara yang menduduki peringkat teratas, dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transformasi digital yang dihasilkan oleh industri 4,0 berkontribusi terhadap peningkatan akuntansi dan pelaporan berkelanjutan, serta dapat mempercepat terwujudnya produksi ramah lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Dumitru dkk (2023); dan Peng dkk (2023) mengungkapkan Indikator transformasi digital perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi dan sosial, serta berperan sebagai bentuk perlindungan lingkungan melalui pengurangan polusi. Oleh karena itu, transformasi digital dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menetapkan strategi ekonomi dan lingkungan, sekaligus



ng peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan
utan.

Pengelolaan dan keberlanjutan lingkungan telah menjadi prioritas penting dalam lingkungan bisnis kontemporer, dimana organisasi mengintegrasikan praktik berkelanjutan pada tingkat proses bisnis melalui perencanaan sumber daya perusahaan berkelanjutan yang memiliki manfaat yaitu meminimalkan kesalahan, mengurangi sistem yang manual, serta meningkatkan visibilitas informasi keberlanjutan, namun terdapat kelemahan dalam penggunaan sistem yaitu ketidakmampuannya mengintegrasikan keberlanjutan diseluruh fungsi bisnis secara holistik karena memerlukan biaya yang cukup besar (Anjaria, 2024). Pada akhirnya dalam penelitian ini menekankan potensi praktik bisnis yang terinformasi berkelanjutan dan efisien, sehingga memperkuat gagasan bahwa kemajuan teknologi dan pengelolaan lingkungan dapat berkembang secara bersamaan.

2.2. Pelaporan Berkelanjutan

Salah satu bidang akuntansi yang berfokus pada lingkungan adalah akuntansi keberlanjutan, yang dianggap sebagai sub kategori dari akuntansi keuangan. Akuntansi keberlanjutan menitikberatkan pada pengungkapan informasi *non*-keuangan mengenai kinerja organisasi kepada pihak eksternal, seperti pemegang modal, pemangku kepentingan, kreditur, dan otoritas terkait. Akuntansi keberlanjutan berkaitan dengan akuntansi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan internal serta pembentukan kebijakan baru yang berdampak pada kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, ekologi, dan sosial.

Sebagai hasil dari pelaporan *triple bottom line*, *Global Reporting Initiative* (GRI) didirikan dengan tujuan memberikan panduan bagi organisasi dalam keberlanjutan, guna memastikan konsistensi informasi sosial dan lingkungan. GRI menegaskan bahwa pelaporan kinerja lingkungan dan sosial



oleh organisasi sama pentingnya dengan pelaporan keuangan. Banyak organisasi mengadopsi metode dan teknik baru dalam pengungkapan keuangan, yang juga mencakup informasi mengenai kegiatan inti serta dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemangku kepentingan, pemasok, lembaga pemerintah, dan kreditur menginginkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu organisasi mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sukaharsono dan Andayani, 2021).

Institusi of Chartered Accountants di England and wales/ (ICAEW) mengeluarkan laporan berkelanjutan berjudul : peran akuntan pada Oktober 2004, tujuan laporan adalah untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu keberlanjutan yang menunjukkan bagaimana akuntan professional dapat lebih terlibat dan meningkatkan debat *public* tentang keberlanjutan. Penyedia informasi yang diperlukan detail yang menghasilkan melalui proses produksi pemantauan, evaluasi kinerja perusahaan dan berkomunikasi umpan balik melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih besar. Informasi ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan patokan yang berguna bagi para pembuat keputusan serta menerapkan pengetahuan tentang peraturan yang ada dan dapat diperdagangkan untuk mempersiapkan ekonomi izin usaha untuk mengubah rezim ekonomi (Sukaharsono dan Andayani, 2021). *Global Sustainability Standards Board* (2013) mengatakan bahwa laporan berkelanjutan yang dikutip merupakan *platform* kunci untuk mengkomunikasikan kinerja dan dampak keberlanjutan baik positif maupun negatif.

Konsep dari pembangunan berkelanjutan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pada Tahun 1992. Konsep ini disampaikan oleh Wulandari (2004) yang meliputi pengamanan pelestarian, pemerataan, dan konservasi sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, serta pertahanan



kualitas kehidupan manusia masa kini hingga masa yang akan datang. Berikut gambar konsep *sustainability* serta penjelasannya sebagai berikut :



Gambar 2.1
Konsep *Sustainability*

a. Gagasan Sumber Daya Alam

Sumber Daya alam memiliki porsinya masing-masing, sehingga pengelolaanya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini hingga masa yang akan datang. Agar sumber daya alam, tidak merusak lingkungan dan meningkatkan kegiatan pembangunan yang mempunyai dampak bagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

b. Gagasan Peduli Sosial

Indikator gagasan ini yang berhubungan dengan masyarakat, pendidikan, pemerataan, sumber daya sosial, kesehatan, kesejahteraan, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia masa kini hingga masa yang akan datang.

c. Gagasan Pertukaran Ekonomi: Akselerasi ekonomi harus tumbuh untuk mensejahterahkan manusia

Setelah membahas tentang konsep pelaporan berkelanjutan yang dijadikan salah satu bentuk pelaporan yang dilakukan oleh institusi untuk r, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan untabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja



perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan, dimana pelaporan ini terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosial (Sukaharsono dan Andayani, 2021). Ariadi dan Sundari (2024) mengatakan bahwa pengungkapan yang dimaksud dalam bentuk aspek sosial, dimana entitas telah mengungkapkan CSR dengan penggunaan GRI 4 yaitu : praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, lingkungan, kinerja masyarakat, ekonomi, hak asasi manusia, dan tidak diungkapkan mengenai indikator kinerja tanggung jawab produk. Indikator kinerja tanggung jawab produk di dalamnya harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya: aspek kesehatan, dan keselamatan pelanggan, pemasangan label bagi produk dan jasa, komunikasi pemasaran, keleluasaan pribadi pelanggan, kepatuhan (*Global Sustainability Standards Board, 2013*).

Dengan adanya indikator sosial atau biasa dikenal dengan dimensi sosial, dimensi ini merujuk pada kegiatan sosial yang berkaitan dengan keberlanjutan. Adapun peran utama yang berkaitan dengan dimensi sosial diantaranya (Silitonga dkk, 2023):

a. Kesejahteraan masyarakat

Dimensi sosial ini menganggap bahwa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi, dengan melibatkan atau memastikan keadilan sosial, kesetaraan, akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Fokus ini membawa keuntungan bagi organisasi dan berkontribusi positif terhadap masyarakat yang berdampak.



b. Keterlibatan dan Partisipasi

Dimensi sosial mendorong adanya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pemangku kepentingan sosial. Dengan adanya keterlibatan pemangku kepentingan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

c. Dampak positif terhadap masyarakat

Dimensi sosial juga menekankan pentingnya menciptakan dampak positif terhadap masyarakat. Ini mencakup organisasi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, memajukan pembangunan komunitas dan mendukung inisiatif sosial. Dampak positif yang dihasilkan membantu membangun reputasi dan citra perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.

d. Etika dan Keadilan

Dimensi sosial juga melibatkan aspek-etika dan keadilan dalam pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Fokus pada etika dan keadilan membantu mendorong keberlanjutan jangka panjang dan memastikan organisasi tidak merugikan dan mengeksploitasi masyarakat dan membawa dampak buruk pada lingkungan.

Dimensi sosial merupakan bagian dari penerapan *sustainability reporting*, yang mengatakan bahwa perusahaan di suatu organisasi dianggap penting, tetapi dalam penelitian yang dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan

di bursa efek indonesia, terdapat 92 perusahaan menunjukkan bahwa besar organisasi tidak sepenuhnya menerapkan *sustainability*



reporting, hal itu ditunjukkan bahwa pada pengungkapan di laporan tahunan hanya mengungkapkan tentang kinerja ekonomi dan kepedulian akan masalah-masalah sosial dan lingkungan hanya dalam bentuk informasi atau narasi dan tidak diikuti dengan data yang bersifat kuantitatif (Rofelawaty, 2014). Hal ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk mempertimbangkan penggunaan indikator sosial, ekonomi dan lingkungan, untuk mewujudkan suatu organisasi bertahan dalam jangka panjang. Hal yang berbeda diungkapkan terkait penerapan pelaporan dengan konsep *triple bottom line* dengan mendukung adanya penerapan konsep *finite uniformity*, dimana lebih ditekankan bahwa TBL dapat dilaporkan sesuai dengan kondisi ekonomi yang relevan (Pranesti, 2019).

Pada umumnya pelaporan berkelanjutan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja dan mengelola perubahan dalam rangka membuat organisasi lebih berkelanjutan. Dimana laporan berkelanjutan ini memberikan informasi tentang dampak organisasi terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Melalui penerapan ini diharapkan organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan yang didasarkan atas etika bisnis. Untuk mewujudkan penerapan ini maka dibutuhkan peran prinsip pelaporan untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan, oleh karena itu harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok (Sukaharsono dan Andayani, 2021):

a. Prinsip untuk menentukan membuat konten laporan

- a) Keterlibatan Pemangku Kepentingan: organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan dapat mencakup antara lain karyawan, pekerja lainnya, pemegang saham, pemasok, masyarakat lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat sipil lainnya. Cara yang digunakan untuk



memenuhi prinsip ini mencakup pemantauan media, keterlibatan dengan komunitas imiah, atau kegiatan kolaboratif dengan rekan-rekan dan para pemangku kepentingan. Hasil yang didapatkan terlaksananya kegiatan keberlanjutan di dalam suatu organisasi karena adanya dukungan dari pemangku kepentingan.

- b) Konteks keberlanjutan: laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang luas. Informasi mengenai kinerja diharapkan untuk diikutsertakan dalam konteks laporan. Pertanyaan yang mendasari pelaporan berkelanjutan adalah cara organisasi memberikan kontribusi di masa depan, untuk peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi, lingkungan dan sosial di tingkat lokal, regional maupun global. Oleh karena itu tujuannya untuk menyajikan kinerja organisasi dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan lebih luas.
- c) Materialitas, laporan harus memuat aspek-aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang berdampak pada organisasi. Sebuah organisasi dihadapkan dengan berbagai topik yang dapat dilaporkan. Topik relevan yang berpotensi untuk dimasukkan dalam laporan, adalah topik yang dianggap cukup penting untuk mencerminkan dampak ekonomi, sosial organisasi, lingkungan atau mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini dampak mengacu pada efek yang ditimbulkan sebuah organisasi terhadap ekonomi, lingkungan atau masyarakat (positif atau negatif). Sebuah topik dapat relevan dan berpotensi material hanya berdasarkan pada salah satu dimensi ini. Dalam pelaporan keuangan, materialitas umumnya dianggap sebagai ambang batas untuk mempengaruhi keputusan ekonomi dari institusi yang menggunakan laporan keuangan organisasi, investor pada



khususnya. Oleh karena itu laporan harus mencakup topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan, ekonomi signifikan organisasi pelapor dan secara para pemangku kepentingan.

- d) Kelengkapan. Laporan harus mencakup informasi mengenai aspek material serta batasannya. Kelengkapan yang dimaksud harus memuat beberapa hal diantaranya: topik material yang dibahas dalam laporan, batasan topik, serta waktu. Konsep kelengkapan juga dapat merujuk kepada praktik dalam pengumpulan informasi dan apakah penyajian informasi layak dan sesuai. Daftar topik yang dibahas dalam laporan, dengan tujuan untuk menentukan apakah informasi dalam laporan tersebut cukup dengan melibatkan pemangku kepentingan. Batasan Topik adalah dengan melibatkan organisasi dalam menyajikan laporan yang sesuai dengan standar GRI, diharapkan tidak hanya melaporkan mengenai dampak yang disebabkan, tetapi juga mengenai dampak yang dikontribusinya dan dampak secara langsung terkait. Waktu merujuk pada kebutuhan agar informasi yang dipilih diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh laporan dengan mencerminkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, yang berguna bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.

b. Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas pelaporan

- a) Keseimbangan, laporan harus memuat aspek positif dan negatif organisasi untuk memungkinkan penilaian kinerja keseluruhan yang wajar. Laporan diharapkan untuk menghindari pemilihan, penghapusan atau penyajian format yang mungkin memengaruhi secara tidak wajar atau tidak benar keputusan atau penilaian oleh pembaca laporan. Laporan diharapkan untuk menyertakan kedua hasil yang



menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, serta informasi yang dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan sesuai dengan materialitasnya. Laporan ini diharapkan untuk membedakan dengan jelas antara fakta dan interpretasi organisasi.

- b) Komparabilitas, organisasi harus memilah, memilih dan melaporkan secara konsisten.
- c) Ketepatan, informasi yang disajikan harus detail dan akurat secara wajar bagi penilaian kinerja organisasi oleh pemangku kepentingan.
- d) Ketepatan waktu, organisasi harus melaporkan secara rutin agar informasi bagi pemangku kepentingan sebagai dasar membuat keputusan.
- e) Kejelasan, organisasi harus menyajikan laporan yang mudah dipahami dan diakses bagi pemangku kepentingan. Penting bahwa para pemangku kepentingan dapat menemukan informasi yang diinginkan tanpa usaha berlebihan. Informasi diharapkan untuk disajikan dalam cara yang dipahami para pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai organisasi dan kegiatannya.
- f) Keandalan, hal ini sangat penting bahwa para pemangku kepentingan yakin bahwa laporannya dapat diperiksa untuk membuktikan keabsahan isinya dan sejauh mana prinsip-prinsip pelaporan diterapkan. Dimana organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis dan menyajikan informasi yang proses yang digunakan dalam mempersiapkan laporan.

c. Tujuan dan manfaat Keberlanjutan Pelaporan



akin banyak organisasi yang mengeluarkan laporan lingkungan dan keberlanjutan yang menimbulkan pertanyaan tentang alasan kegiatan

organisasi ini dan manfaat yang dihasilkan pelaporan keberlanjutan bagi organisasi. Diantara tujuan dan manfaat paling penting dari pelaporan keberlanjutan adalah :

- a) Pengesahan kegiatan, produk dan layanan organisasi yang menciptakan dampak lingkungan dan sosial
- b) Meningkatkan reputasi bagi organisasi dan nilai merek
- c) Mendapatkan keunggulan kompetitif
- d) Menandakan daya saing yang unggul, dengan kegiatan pelaporan
- e) Keberlanjutan sebagai indikator proksi untuk kinerja keseluruhan
- f) Perbandingan dan pembandingan terhadap pesaing
- g) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi
- h) Menetapkan dan mendukung motivasi karyawan serta informasi internal dan proses kontrol

Sustainability accounting memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian keberlanjutan kontemporer, dimana membahas terkait konteks keberlanjutan dan mengembangkannya untuk penelitian di masa depan, dengan mengkaji 1.283 artikel yang mencoba mencari makna mendalam terkait manfaat akuntansi keberlanjutan (Hsiao dkk, 2022; Rahi dkk, 2022). Untuk mengembangkan akuntansi keberlanjutan maka dibutuhkan keterlibatan akuntan baik bidang akuntansi manajemen dan peran akuntan untuk memperluas kompetensi pihak SDM dan dibutuhkan peran pendidikan akuntansi dalam meningkatkan keberlanjutan entitas dan mendorong untuk mengadopsi di dalam suatu organisasi (Ascani dkk, 2021; Bhat dan Khan, 2023; Ebaid, 2022).

Dengan adanya pengetahuan dalam bidang akuntansi akan berdampak lainnya meningkatkan reputasi tetapi juga menambah nilai pada laporan, pemantauan, dan akuntabilitas organisasi (Hazaea dkk, 2022).



Pengetahuan akuntansi yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan dengan mengubah kurikulum, memanfaatkan teknologi /digital akibat adanya perubahan yang berkembang karena adanya pengaruh alam seperti pada masa *Covid 19*, dimana semua organisasi baik organisasi *profit* dan *nonprofit* mengharuskan menggunakan teknologi untuk mendukung keberlanjutan organisasi (Alotaibi, 2022; Angelaki dkk, 2024; Gil-Marín dkk, 2022; Värzaru, 2022).

Meskipun ada manfaat memasukkan indikator pembangunan berkelanjutan, dimana manfaat ini erat kaitannya karena adanya penggunaan kerangka kerja seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan standar jaminan, hasil akhir dari kepatuhan dengan ini bisa menjadi laporan yang sangat panjang dan tidak dapat diakses. Kurangnya kepatuhan terhadap standar yang berlaku menjadi salah satu kendala dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Proses penyusunan laporan memerlukan komitmen dan upaya besar dari organisasi, sehingga penting untuk memastikan bahwa proses tersebut memberikan nilai yang nyata. Selain hambatan tersebut, terdapat tantangan lain dalam penerapan *sustainability reporting* (SR). Salah satu tantangan utama yang paling umum adalah kurangnya pemahaman mengenai definisi pembangunan berkelanjutan serta hubungan antara bisnis dan keberlanjutan sebagai tujuan akhir. Hal ini disebabkan karena sebagian besar organisasi masih menjalankan bisnis secara tradisional dengan fokus pada maksimalisasi keuntungan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan modal demi kepentingan pemegang saham (Sukoharsono dan Andayani, 2021).

Hal itu juga ditunjukkan dalam penelitian (Ebaid, 2023) yang mengatakan bahwa pelaporan keberlanjutan di perusahaan masih rendah dan masih ada keinginan investor untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya, dapat hambatan lain dalam mengadopsi keberlanjutan terkait praktik



akuntansi diantaranya: hambatan pelaporan akuntansi, hambatan keuangan/ekonomi, hambatan teknologi, hambatan manajerial/ perilaku, hambatan organisasi dan hambatan kelembagaan (Kwarteng dkk, 2022).

Khodamipour dkk (2024) mengatakan salah satu yang menjadi hambatan dalam menerapkan indikator keberlanjutan yaitu karena adanya perbedaan budaya dan ini merupakan hambatan utama yang menjadi alasan hambatan akuntansi tanggung jawab sosial, dimana kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntansi tanggung jawab sosial, kurangnya peraturan pelaksanaan akuntansi tanggung jawab sosial dan ukuran organisasi, sehingga perlu membentuk standar bagi pembuat kebijakan untuk mengadopsi kebijakan yang memfasilitasi penerapan akuntansi tanggung jawab sosial untuk mencapai keberlanjutan. Pembentukan standar dalam akuntansi keberlanjutan berdasarkan hasil survei yang harus dilaksanakan diantaranya: pelaporan dan pengungkapan, keberlanjutan sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen, akuntansi dan pengelolaan lingkungan, keterlibatan dan akuntabilitas pemangku kepentingan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial bisnis (Kalbouneh dkk, 2023).

Pembentukan standar yang dimaksud dalam penelitian ini yang diperoleh melalui hasil survei, yang mengidentifikasi empat *tren* penelitian utama dalam akuntansi keberlanjutan: pelaporan dan pengungkapan, keberlanjutan sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen, akuntansi dan pengelolaan lingkungan, keterlibatan dan akuntabilitas pemangku kepentingan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial bisnis. Edukasi dan berbagi informasi tentang akuntansi berkelanjutan, Akuntansi berkelanjutan ramah lingkungan,

dan teknologi dalam akuntansi berkelanjutan, termasuk *artificial*



intelligence (AI), Big Data, dan Internet of Things (IOT), serta Environmental, Social, and Governance (ESG).

Laporan ini menyajikan pemeriksaan menyeluruh terhadap tren penelitian yang bersinggungan dengan akuntansi berkelanjutan, serta arah penelitian prospektif (Kwarteng dkk, 2022). Untuk membentuk sistem ini maka dibutuhkan peran akuntansi untuk mendukung keberlanjutan di dalam suatu organisasi, sedangkan beberapa penelitian tidak memiliki sumber daya manusia dalam bentuk internal *control* yaitu seorang akuntan di dalam suatu organisasi sehingga ini merupakan salah satu penghambat keberlanjutan suatu organisasi (Arora dkk, 2023; Halari dan Baric, 2023; Özsözgün Çalışkan, 2014).

Global Reporting Initiative (GRI) mendefenisikan *sustainability report* sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas organisasi sebagai tanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Sustainability report* akan menjadi salah satu media untuk mendeskripsikan pelaporan ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial seperti halnya konsep *triple bottom line*, pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

GRI merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan penerapan diseluruh dunia. Oleh karena itu GRI membentuk sebuah standar pelaporan keberlanjutan GRI. Standar ini dikembangkan melalui proses yang melibatkan pemangku kepentingan global dari perwakilan bisnis, tenaga kerja, masyarakat sipil, dan pasar keuangan serta auditor dan pakar di berbagai bidang. Berikut terdapat pengungkapan GRI,



n :

Tabel 2.1
Indikator Global Reporting Initiative 4 (GRI 4)

KATEGORI	ASPEK
Ekonomi	Kinerja Ekonomi
	Keberadaan di Pasar
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung
	Praktik Pengadaan
Lingkungan	Bahan
	Energi
	Air
	Keanekaragaman Hayati
	Emisi
	Efluen dan Limbah
	Produk dan Jasa
	Kepatuhan
	Transportasi
	Lain-lain
	Asesmen Pemasok atas lingkungan
	Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan
Sosial :	
Praktik ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja	Kepegawaian
	Hubungan Industrial
	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
	Pelatihan dan Pendidikan
	Keberagaman dan Kesetaraan Peluang
	Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki
	Asesmen Pemasok atas Praktik
	Ketenagakerjaan Mekanisme
	Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
Hak Asasi Manusia	Investasi
	<i>Non-Diskriminasi</i>
	Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama
	Pekerja Anak
	Pekerja Paksa atau Wajib Kerja
	Praktik Pengamanan
	Hak Adat
	Asesmen
	Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia
	Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia
cat	Mayarakat Lokal



	Anti Korupsi
	Kebijakan Publik
	Anti Persaingan
	Kepatuhan
	Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat
	Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat
Tanggung Jawab atas produk	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
	Pelabelan Produk dan Jasa
	Komunikasi Pemasaran
	Privasi Pelanggan
	Kepatuhan

Sumber : GRI 4, (2013)

Dengan adanya indikator yang disajikan pada Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) bertujuan untuk mengulas keinformatifan dan komparabilitas indikator pelaporan *non-keuangan* pada aspek sosial perusahaan dalam melakukan bisnis sesuai dengan standar GRI (Saraswati dkk, 2022). Amalia dkk (2024); dan Oleiwi dkk (2020) mengatakan dengan menggunakan standar GRI memberikan manfaat kepada para pemangku kebijakan lokal untuk mempertimbangkan indikator standar GRI di dalam usaha, sehingga dapat menambah kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keberlanjutan yang disajikan.

Limarwati dkk (2024) menunjukkan letak laporan keberlanjutan memiliki manfaat baik internal dan eksternal. Dari segi internal perusahaan menghasilkan peningkatan efisiensi serta manajemen risiko perusahaan, sedangkan dari segi eksternal perusahaan, laporan keberlanjutan dampak mengurangi dampak negatif pada lingkungan, sosial dan tata kelola serta meningkatkan nilai perusahaan yang di dalamnya mencakup reputasi, kepercayaan serta hubungan dengan pemangku kepentingan. Agustia dkk (2023) dengan adanya organisasi GRI juga memiliki fungsi untuk mempromosikan dan mengembangkan pendekatan



standar untuk pelaporan yang merangsang permintaan untuk informasi keberlanjutan yang akan menguntungkan organisasi pelapor atau yang menggunakan informasi laporan yang sama.

Aljajawy dkk (2022) mengatakan GRI memberikan kriteria dan indikator yang objektif yang dapat diadopsi oleh perusahaan dan berbagai sektor untuk mencapai pengukuran dan tingkat pelaporan yang objektif. Serta dapat dijadikan bentuk komunikasi dan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat serta tantangan mendominasi dinamika kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan (Benameur dkk, 2024; dan Perkiss dkk, 2021). GRI dibentuk untuk menyelaraskan metode pelaporan keberlanjutan dengan pelaporan keuangan dan untuk melembagakan pelaporan *non*-keuangan sebagai praktik rutin. GRI mengembangkan pedomannya dengan latar belakang masyarakat yang bergerak menuju keberlanjutan. Pedoman GRI menyatakan bahwa “berbagai pemangku kepentingan” tertarik pada laporan keberlanjutan, dan bahwa laporan tersebut harus memenuhi harapan kategori wajar, namun pedoman GRI mengharuskan manajer entitas pelapor untuk menentukan penerima laporan dalam wacana pemangku kepentingan (Waldkirch dan Hirsch, 2018).

Beberapa penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan antara permasalahan perizinan dengan isu keberlanjutan sosial dan telah mengabaikan isu ini dan akan berdampak pada dampak negatif terhadap keberlanjutan perusahaan di masa mendatang (Dewi dkk, 2024). Dengan adanya transaksi GRI tidak membuat perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapan pada bidang-bidang yang dianggap penting untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan hidup perusahaan, tetapi perusahaan cenderung menggunakan strategi

shing, dimana hal ini membahas dalam bentuk kualitas pengungkapan material menurun dan berfluktuasi seiring berjalannya waktu (Dragomir



dkk, 2024; Latino dkk, 2020.; Milne dan Gray, 2013; Zharfpeykan dan Akroyd, 2023).

Pelaporan GRI tidak diungkapkan dalam bentuk data kuantitatif dan tata kelola keuangan yang merupakan salah satu indikator di dalam suatu organisasi (Afolabi dkk, 2023; Pandin dkk, 2024). Salah satu penyebabnya karena kurangnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, sehingga dalam penelitian yang dilakukan entitas di pasar sekuritas masih lemah sebesar tingkatan presentase yang dihasilkan (Aljajawy dkk, 2022). Kurangnya keseragaman pelaporan dan jaminan keberlanjutan dapat mengurangi daya banding, efektivitas dan akurasi akuntansi keberlanjutan (Guo dan Yang, 2014). Van Oorschot dkk (2024); dan Vigneau dkk (2015) juga menunjukkan bahwa penerapan standar dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan pada praktik manajemen, sehingga mempengaruhi struktur manajemen, dan fungsi komite, hubungan antar anak perusahaan.

GRI menunjukkan bahwa negara-negara ingin memantau perubahan nilai-nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial ketika mengelola aset nasional, termasuk lautan, untuk masa depan. Akuntansi keberlanjutan berkembang untuk memenuhi tantangan masa depan ini (Garanina dan Kim, 2023). Sousa dkk (2024) memberikan landasan bagi entitas dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar *internasional* yang berlaku.

Oleh karena itu GRI salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang menyediakan prinsip-prinsip pelaporan. Standar ini juga menyediakan referensi

nal untuk semua pihak yang terlibat dengan pengungkapan pendekatan a serta kinerja dan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi organisasi.



Standar ini dikembangkan melalui proses yang melibatkan pemangku kepentingan global dari perwakilan dari bisnis, tenaga kerja, masyarakat sipil dan pasar keuangan serta auditor dan pakar di berbagai bidang dan melalui dialog erat bersama regulator dan pemerintah beberapa negara (Abeysekera, 2022; Aripin, 2023; Dissanayake, 2021; Monte, 2009; Sukaharsono dan Andayani, 2021; Yusof dkk, 2018).

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi nirlaba paling berpengaruh di dunia yang mendefinisikan dirinya sebagai pelopor pelaporan berkelanjutan dan GRI telah berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas dan penyebaran pelaporan. Sehingga dengan adanya GRI entitas yakin bahwa pelaporan yang efektif, dan transparan mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu organisasi akan menghasilkan manfaat luas bagi organisasi itu sendiri, namun juga para pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas (Bosetti, 2022). GRI dalam penelitian ini dengan mengaitkan apakah indikator GRI yang fokus pada kegiatan sosial telah dijalankan di dalam suatu organisasi khususnya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

2.3. Konteks Keberlanjutan Organisasi Muhammadiyah

Suatu organisasi yang mempersiapkan laporan yang sesuai dengan Standar GRI menggunakan standar pengungkapan umum untuk melaporkan informasi kontekstual tentang dirinya dan praktik keberlanjutannya. Terdiri dari beberapa pengungkapan yang terbagi 6 bagian yaitu *profil* organisasi, strategi, etika dan integritas, tata kelola, keterlibatan pemangku kepentingan dan praktik pelaporan (Pranesti, 2019; Sukaharsono dan Andayani, 2021). Keberlanjutan di

suatu organisasi pada umumnya biasa ditemui di organisasi *profit*, tetapi



bisa juga di temui organisasi nirlaba, diantaranya dalam dunia perguruan tinggi melalui kurikulum, keberlanjutan organisasi (Ceulemans dkk, 2015).

Akuntansi sosial nirlaba terintegrasi yang memperhitungkan khusus organisasi nirlaba dengan tujuan untuk mencapai misi dan bertahan sebagai sebuah organisasi, adapun karakteristik dengan melakukan keterlibatan dengan relawan, dampak ekonomi, sosial dan lingkungannya, adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah organisasi untuk mencapai tujuannya: ekonomi dan sumber daya manusia, penciptaan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan, sistem dan proses internal, pembelajaran organisasi, pertumbuhan dan inovasi (Mook, 2014).

Organisasi nirlaba mempunyai kewajiban untuk menilai dan melaporkan kinerja keberlanjutan untuk memperhitungkan dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan, budaya, ekonomi dan sosial serta menawarkan keuntungan praktis bagi organisasi yang mengintegrasikan praktik tersebut (Jones dan Mucha, 2014). Selain itu, hal ini juga akan mempengaruhi keberlanjutan di masa depan dengan mengaitkan data dari GRI guna meningkatkan kualitas informasi dan keandalan pelaporan keberlanjutan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Alali dkk., 2019; Civitillo, 2023; Papaspyropoulos dkk, 2012).

Organisasi nirlaba berkontribusi melalui penciptaan nilai sosial. Organisasi beroperasi dalam konteks yang semakin bergejolak, dimana pembangunan organisasi yang berkelanjutan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting, temuan ini menunjukkan bahwa sebagai *respons* terhadap meningkatnya lingkungan kompetitif (Weerawardena dkk, 2010).



Secara lembaga sistem akuntan keberlanjutan terdapat acuan global dijadikan dasar kebijakan sistem akuntansi keberlanjutan seperti

dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB). Sebagai organisasi nirlaba independen, misi dewan ini adalah mengembangkan dan menyebarluaskan informasi penting yang dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan serta investor terkait pelaporan (Hales, 2021). Standar SASB ini akan membantu organisasi, mengumpulkan, membangun dan secara efektif mengungkapkan data kinerja terkait untuk resiko dan peluang material terkait perubahan iklim yang telah diidentifikasi (CDSB, 2019). SASB dijadikan salah satu standar untuk melaporkan organisasi atau perusahaan dari semua bidang dan untuk terlaksananya maka perlu adanya regulasi untuk melembagan akuntansi keberlanjutan (Hifni dkk, 2020; IFC, 2019).

CDP (*Carbon Disclosure Project*) merupakan salah satu organisasi nirlaba yang menjalankan sistem pengungkapan global bagi investor, perusahaan, kota, negara bagian dan wilayah guna mengelola dampak lingkungan, dalam hal ini membangun kumpulan data lingkungan yang dilaporkan sendiri yang memiliki data *base* paling lengkap di dunia. CDP mengkhususkan pada pelaporan data terhadap perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, energi (Meutia, 2020).

Mook (2014) mengembangkan model akuntansi nirlaba yang terintegrasi dengan tujuan untuk mencapai misi yang diinginkan yaitu tetap bertahan sebagai organisasi yang memiliki keterlibatan dengan relawan, dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga dikembangkan beberapa model ini dengan menggabungkan 4 elemen yaitu: Ekonomi sumber daya manusia, penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan, sistem dan proses internal, pembelajaran organisasi, pertumbuhan dan inovasi.



egitu banyak manfaat yang dihasilkan dari organisasi *nonprofit* yang
 ispi konteks keberlanjutan, dan yang menjadi kendala adalah tidak ada

pengelompokkan yang mengikuti kerangka pelaporan standar. Perusahaan-perusahaan nirlaba lebih cenderung menerbitkan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri dan lebih cenderung memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan PBB (Hamilton dan Waters, 2022).

Adanya berbagai standar dan manfaat yang diperoleh dari keterkaitan organisasi nirlaba dengan konteks akuntansi keberlanjutan menjadi salah satu bentuk upaya menjaga keberlanjutan organisasi di masa depan. Organisasi nirlaba tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah, yaitu mendirikan usaha dengan menerapkan nilai-nilai Islami yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan manusia dan lingkungan, yang sering disebut dengan konsep *prophet* (Huda, 2016; Nugrahanti, 2016; Purnomosidi dan Sukoharsono, 2022; Sukoharsono dan Andayani, 2021).

Konsep *prophet* merupakan salah satu bagian dari indikator *penutup* *bottom line* yang menjadi bagian rujukan dari konsep *triple bottom line* kemudian di dekonstruksi dengan nilai-nilai islami yang biasa dikenal dengan pendekatan spiritualitas yang ada di organisasi muhammadiyah. Organisasi ini merupakan bagian integral dari amal usaha Muhammadiyah, dimana merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mencerdaskan bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, dalam menjalankan misinya Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Organisasi ini tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari Pemerintah, tetapi juga aktif mencari sumber pendanaan lain dari masyarakat, alumni dan amal usaha Muhammadiyah/ investasi lainnya (Hidayat dan Hudaidah, 2021; Lokseumawe,



meiteanu dkk, 2022; Sukoharsono dan Andayani, 2021; Suroso, 2023; 118).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dikategorikan organisasi *non profit* karena memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. PTM memiliki beberapa karakteristik organisasi *nonprofit*, diantaranya sebagai konteks misi social, ketidakbertujuan/investasi, akuntabilitas (Nashir, 2022; Nasution, 2019; Rayyani dan Abbas, 2020; Rizky, 2022; Suroso, 2023).

Karakteristik tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Terdapat beberapa perspektif mengenai akuntansi keberlanjutan dalam organisasi Muhammadiyah, khususnya yang berfokus pada aspek sosial:

a. Nilai-Nilai Religi dalam memandang Keberlanjutan

Nilai religius dan fatwa Muhammadiyah memandang konsep keberlanjutan secara holistik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek material atau ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan etika terhadap sesama manusia serta alam sekitar. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Islam seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial (amanah) menjadi landasan utama dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Keterkaitan dengan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI), khususnya yang berfokus pada aspek sosial, dapat dilihat dari bagaimana Muhammadiyah menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari keberlanjutan. Indikator sosial GRI mencakup isu-isu seperti hak

i manusia, kondisi kerja, keterlibatan komunitas, dan kontribusi terhadap lingkungan sosial. Muhammadiyah, melalui fatwa dan nilai religiusnya,



mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas organisasi dan bisnis.

Keberlanjutan menurut perspektif Muhammadiyah bukan hanya sekadar memenuhi standar pelaporan atau regulasi, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab spiritual dan sosial yang mendalam. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi organisasi dalam merancang strategi keberlanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia dan pelestarian lingkungan, sesuai dengan ajaran Islam.

b. Konsep Teologis Lingkungan

Muhammadiyah menekankan pentingnya teologi lingkungan dalam ajaran Islam. Konsep ini berdasarkan pada pemahaman bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Manusia diberi Amanah untuk menjaga kelestarian alam sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta.

c. Prinsip Hifdz al-Bi'ah (Menjaga Alam)

Dalam ajaran Islam yang dianut oleh Muhammadiyah, prinsip 'hifdz al-bi'ah' atau menjaga dan melindungi lingkungan hidup merupakan bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip ini menegaskan kewajiban manusia untuk merawat dan menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah SWT. Konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pengelolaan

per daya alam secara berkelanjutan.



Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Ar-Rum: 41 secara tegas mengandung perintah kepada manusia untuk tidak merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. QS. Al-A'raf: 56 menyatakan, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya", yang mengandung makna larangan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Sementara QS. Ar-Rum: 41 menjelaskan bahwa kerusakan di muka bumi terjadi akibat perbuatan manusia sendiri, sebagai akibat dari ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan sosial.

Penafsiran Muhammadiyah terhadap ayat-ayat ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh setiap individu dan organisasi. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ekologis, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketaatan kepada ajaran agama. Dalam konteks ini, prinsip 'hifdz al-bia'ah' menjadi landasan bagi penerapan akuntansi keberlanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik bisnis dan sosial, guna mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Muhammadiyah menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah ilahi yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlanjutan kehidupan manusia dan alam di masa depan, sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani dan etika Islam.

d. Konsep Khalifah Fil Ardh (Pengurus di Bumi)

Muhammadiyah mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga alam dengan bijak. Ini sejalan dengan indikator GRI yang fokus pada keterlibatan



Masyarakat dan hak asasi manusia, karena Muhammadiyah memandang bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menjalankan ajaran islam.

2.3.1 Pandangan Indikator GRI yang sejalan dengan Nilai Islami

a. Ketenagakerjaan

Muhammadiyah menekankan pentingnya keadilan dalam ketenagakerjaan, sesuai dengan prinsip-prinsip islam tentang perlindungan hak-hak karyawan. Ini sejalan dengan indicator GRI seperti GRI 401 (*Employment*) dan GRI 402 (*Labor/Management Relations*) yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja.

b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Muhammadiyah memandang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebagai bagian penting dari tanggung jawab sosial organisasi, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan standar internasional seperti indikator GRI 403. Fokus utamanya adalah pencegahan dan pengelolaan risiko untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Implementasi K3 mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, memperkuat kepercayaan antara organisasi, pekerja, dan masyarakat. Pelaporan K3 melalui GRI 403 mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam keberlanjutan, menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap kesejahteraan pekerja dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.

c. Hak Asasi Manusia

Muhammadiyah memandang hak asasi manusia sebagai bagian integral dari ajaran islam. Indikator GRI seperti GRI 412 (*Human*



Rights Assessment) sejalan dengan prinsip-prinsip islam tentang keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

d. Keterlibatan Masyarakat

Muhammadiyah menekankan pentingnya keterlibatan Masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan dan evaluasi kinerja *social*. Ini sejalan dengan indicator GRI 413 (*Local Communities*), yang menekankan pada keterlibatan Masyarakat local dan dampak operasional terhadap Masyarakat setempat.

2.4. Kerangka Konseptual

Akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting*) merupakan suatu pendekatan pelaporan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam melaporkan dampak aktivitasnya secara komprehensif, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Praktik ini mencerminkan tanggung jawab organisasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan menjadi alat strategis yang memungkinkan organisasi untuk mengkomunikasikan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Organisasi Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari organisasi sekuler lainnya. Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius Islam menjadi landasan etika dan moral dalam setiap aktivitasnya. Melalui program sosial, pendidikan, kesehatan, dan dakwah, Muhammadiyah



berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan religius ini menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keberlanjutan, di mana nilai-nilai moral, etika, dan spiritual Islam menuntun organisasi dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Dalam konteks penelitian akuntansi keberlanjutan Muhammadiyah, pendekatan religius ini tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas sosial dan budaya yang melingkupi organisasi, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan postmodernisme sebagai kerangka teoritis untuk mengkaji dan mengkritisi narasi tunggal dan dominan yang sering kali muncul dalam literatur akuntansi keberlanjutan. Pendekatan postmodernisme menolak pandangan universal dan objektif yang mengabaikan keberagaman interpretasi dan konteks lokal. Sebaliknya, postmodernisme membuka ruang bagi pluralitas makna dan pemahaman yang lebih kaya terhadap praktik keberlanjutan, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan religius yang memengaruhi bagaimana organisasi seperti Muhammadiyah memaknai dan melaporkan keberlanjutannya.

Dengan menggunakan pendekatan postmodernisme, penelitian ini berupaya mendekonstruksi narasi resmi yang mungkin terlalu normatif dan tunggal, serta menggali bagaimana nilai-nilai religius Islam secara dinamis membentuk praktik akuntansi keberlanjutan dalam Muhammadiyah. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kontradiksi, ambiguitas, dan kompleksitas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial organisasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap hubungan antara agama, sosial, dan akuntansi keberlanjutan.



alam kerangka akuntansi keberlanjutan, *Global Reporting Initiative* merupakan standar internasional yang banyak digunakan untuk pelaporan

keberlanjutan, termasuk aspek sosial. Fokus pada aspek sosial sangat penting karena organisasi tidak hanya bertanggung jawab atas dampak ekonomi dan lingkungan, tetapi juga terhadap kesejahteraan dan hak-hak manusia yang terlibat atau terdampak oleh aktivitasnya.

Organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berlandaskan nilai-nilai yang kuat dari ajaran Al-Quran dan Hadist, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial sebagai amanah yang harus dijalankan. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip keberlanjutan sosial yang menuntut organisasi tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Beberapa ayat-ayat dalam mengintegrasikan aspek sosial yaitu: Surat Ali Imran (3): 110 menegaskan bahwa umat terbaik adalah yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah, yang mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual organisasi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan beretika. Selain itu, QS An-Nisa: 58 menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan, yang menjadi prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang berkelanjutan dan transparan.

Pendekatan tasawuf Muhammadiyah menambah dimensi spiritual dan etika kerja yang kuat dengan menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (habl minallah), sesama manusia (habl minannas), dan alam (habl minal-alam). QS Al-Hujurat: 13 menolak diskriminasi dan menegaskan kesetaraan serta ukhuwah Islamiyah, yang menjadi dasar inklusivitas dan keadilan sosial dalam organisasi. QS Al Anbiya: 107 mengajarkan kasih sayang



pedulian sosial, yang mendorong organisasi untuk memberikan manfaat yang luas, sementara QS Al A-Raf: 56 mengingatkan untuk menjaga

keseimbangan dan tidak berlebihan dalam pengelolaan sumber daya, sesuai prinsip keberlanjutan yang ramah lingkungan.

Kesadaran spiritual dan introspeksi yang ditekankan QS Al-Ahzab: 70 mendorong evaluasi diri secara berkelanjutan, memperkuat komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam konteks keberlanjutan sosial melalui pendekatan tasawuf Muhammadiyah memberikan kerangka kerja yang holistik dan bermakna untuk menjalankan keberlanjutan sosial secara efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh. Aspek keberlanjutan dalam hal ini mengacu pada aspek Indikator GRI yang diintegrasikan nilai-nilai Islam yang fokus pada aspek sosial.

Aspek Pertama: Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja. Indikator ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan lingkungan kerja yang kondusif. Kesejahteraan pekerja meliputi upah yang adil, jaminan sosial, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Kondisi kerja yang aman dan nyaman menjadi prioritas, termasuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta penyediaan fasilitas yang mendukung kesehatan fisik dan mental pekerja. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting, guna meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan jangka panjang pekerja.

Dialog sosial antara manajemen dan pekerja atau serikat pekerja menjadi mekanisme penting untuk memastikan komunikasi terbuka, penyelesaian konflik, dan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi



Dalam konteks Muhammadiyah, nilai-nilai keadilan dan amanah dalam

Islam mendorong penerapan praktik ketenagakerjaan yang tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga nilai moral dan etika keagamaan.

Aspek Kedua: Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Dalam kerangka akuntansi keberlanjutan, penghormatan terhadap HAM tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga aspek yang harus dilaporkan secara transparan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial organisasi. Organisasi yang mengintegrasikan penghormatan HAM dalam praktiknya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Secara spesifik, organisasi bertanggung jawab untuk mencegah segala bentuk diskriminasi yang dapat terjadi dalam lingkungan kerja maupun dalam interaksinya dengan masyarakat. Diskriminasi berdasarkan *gender*, suku, agama, ras, orientasi seksual, atau latar belakang sosial-ekonomi merupakan pelanggaran HAM yang harus dihindari. Pencegahan diskriminasi ini mencakup penerapan kebijakan yang inklusif, pelatihan kesadaran HAM bagi seluruh anggota organisasi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik yang efektif.

Perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat dari pelanggaran HAM juga menjadi fokus utama. Praktik-praktik seperti eksploitasi tenaga kerja anak, kerja paksa, pelecehan seksual, atau bentuk kekerasan dan intimidasi lainnya harus diidentifikasi dan dicegah secara proaktif. Dalam laporan keberlanjutan, organisasi wajib mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak tersebut, termasuk audit internal, pengawasan, dan kolaborasi dengan

eksternal yang berkompeten.



Selain itu, organisasi harus memastikan bahwa kebijakan internal dan praktik operasionalnya mendukung penghormatan HAM secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini meliputi penyusunan kode etik, prosedur standar operasional, dan pelatihan berkelanjutan yang menanamkan nilai-nilai HAM pada seluruh level organisasi. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan HAM juga penting untuk menjaga integritas dan efektivitas perlindungan tersebut.

Dalam konteks organisasi Muhammadiyah, penghormatan terhadap HAM mendapat landasan yang sangat kuat dari prinsip-prinsip Islam. Islam menempatkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi. Konsep tauhid menegaskan kesamaan hak dan kewajiban setiap manusia di hadapan Allah, sehingga setiap bentuk pelanggaran HAM bertentangan dengan ajaran agama. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan tanggung jawab sosial (amanah) menjadi dasar etika yang mengarahkan Muhammadiyah dalam menjunjung tinggi HAM.

Lebih jauh, Muhammadiyah memandang penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bukan sekadar sebagai kewajiban legal atau administratif, melainkan sebagai bagian integral dari misi dakwah dan pelayanan sosial yang bersifat transenden, oleh karena itu, pelaporan akuntansi keberlanjutan Muhammadiyah dalam aspek HAM tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga mencerminkan komitmen religius yang mendalam dalam memperjuangkan hak-hak manusia sebagai wujud ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini memperkaya dimensi akuntansi keberlanjutan dengan nilai-nilai

yang menguatkan legitimasi sosial dan moral organisasi, sekaligus



memberikan perspektif kritis dalam menganalisis bagaimana HAM diinternalisasi dan diimplementasikan dalam praktik nyata di lapangan.

Aspek Ketiga: aspek masyarakat dalam akuntansi keberlanjutan menekankan peran dan kontribusi organisasi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Organisasi tidak hanya bertanggung jawab atas dampak internalnya, tetapi juga atas bagaimana aktivitasnya memengaruhi komunitas lokal dan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, pelaporan keberlanjutan harus mencerminkan upaya organisasi dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai program dan inisiatif. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama, yang meliputi pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas ekonomi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian penting, misalnya melalui penyediaan fasilitas pendidikan, beasiswa, layanan kesehatan, dan kampanye kesehatan masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur sosial seperti sarana air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya turut menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan organisasi merupakan indikator penting yang menunjukkan adanya partisipasi aktif dan dialog terbuka antara organisasi dan komunitas lokal. Partisipasi ini tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diakomodasi secara tepat, sehingga program yang



dijalankan relevan dan efektif. Dialog sosial yang berkelanjutan juga membantu mengidentifikasi potensi konflik atau dampak negatif yang mungkin timbul, sehingga dapat dikelola dengan baik.

Dalam pelaporan keberlanjutan, organisasi harus secara transparan mengidentifikasi dan mengelola dampak sosial dari aktivitasnya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dapat berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan jaringan sosial. Sebaliknya, dampak negatif seperti perubahan sosial yang tidak diinginkan, ketimpangan, atau eksklusi sosial juga harus diakui dan diatasi. Manajemen dampak sosial yang efektif menjadi kunci untuk memastikan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara organisasi dan masyarakat.

Muhammadiyah, sebagai organisasi keagamaan dengan misi dakwah dan sosial, secara aktif berkontribusi pada pembangunan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kepedulian sosial (ihsan) dan keadilan (adl). Nilai-nilai ini mendorong Muhammadiyah untuk tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memberdayakan masyarakat secara holistik. Melalui berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan, Muhammadiyah berupaya mewujudkan kesejahteraan bersama yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral.

Pendekatan religius ini memperkuat legitimasi sosial Muhammadiyah dan memberikan dimensi spiritual dalam praktik akuntansi keberlanjutan, di mana kontribusi terhadap masyarakat dipandang sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama manusia. Dengan demikian, pelaporan

utan Muhammadiyah tidak hanya merefleksikan kinerja sosial secara



kuantitatif, tetapi juga nilai-nilai etika dan spiritual yang mendasari setiap tindakan organisasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Tanggung jawab atas produk merupakan aspek krusial dalam akuntansi keberlanjutan yang menuntut organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kualitas dan keamanan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul bagi konsumen dan masyarakat luas. Organisasi harus mampu mengelola dan melaporkan bagaimana pihak entitas menjaga keselamatan konsumen serta memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai produk atau layanan tersebut.

Keamanan konsumen menjadi prioritas utama dalam tanggung jawab produk. Hal ini mencakup perlindungan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan yang dapat ditimbulkan oleh produk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Organisasi harus menerapkan standar pengendalian mutu yang ketat, melakukan pengujian produk secara berkala, dan menyediakan mekanisme penarikan produk jika ditemukan adanya cacat atau risiko yang membahayakan konsumen. Selain itu, transparansi informasi produk menjadi bagian penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan terinformasi mengenai penggunaan produk, termasuk potensi risiko yang mungkin terjadi.

Pelaporan keberlanjutan dalam konteks tanggung jawab produk harus mencakup bagaimana organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan produk atau layanan bagi entitas. Ini termasuk pengungkapan tentang kebijakan kualitas, prosedur pengujian, serta langkah-

yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan yang berlaku. Selain itu, organisasi juga harus melaporkan upaya



edukasi kepada konsumen dan masyarakat mengenai penggunaan produk yang aman dan bertanggung jawab.

Dalam konteks organisasi Muhammadiyah, tanggung jawab atas produk ini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban bisnis semata, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai etika Islam yang mengedepankan kejujuran (sidq), keadilan (adl), dan perlindungan hak konsumen. Dalam ajaran Islam, berbisnis dengan jujur dan adil merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, Muhammadiyah menempatkan aspek tanggung jawab produk sebagai bagian integral dari pelayanan sosial dan dakwahnya.

Nilai kejujuran mendorong transparansi dan keterbukaan dalam penyampaian informasi produk, sehingga konsumen dapat mempercayai produk yang dihasilkan. Prinsip keadilan menuntut agar produk tidak merugikan konsumen dan masyarakat, serta memastikan bahwa manfaat produk dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak. Perlindungan hak konsumen menjadi perhatian utama, di mana Muhammadiyah berupaya memberikan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pelaporan akuntansi keberlanjutan Muhammadiyah dalam aspek tanggung jawab atas produk tidak hanya menampilkan kinerja teknis dan operasional, tetapi juga mencerminkan komitmen religius yang mendalam untuk menjalankan bisnis dan layanan secara etis dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial organisasi sekaligus memperkokoh peran Muhammadiyah sebagai entitas yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam praktik keberlanjutannya.



engan fokus pada indikator-indikator sosial GRI tersebut, penelitian ini ngkaji bagaimana organisasi Muhammadiyah mengintegrasikan nilai-

nilai religius dalam praktik akuntansi keberlanjutannya, khususnya dalam aspek sosial yang sangat relevan dengan misi dan visi organisasi. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk analisis kritis yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang khas dalam Muhammadiyah.

Pelaporan keberlanjutan pada perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan wujud nyata dari komitmen institusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai religius Islam ke dalam praktik akademik, sosial, dan operasional yang berkelanjutan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi kepada pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai refleksi dari tanggung jawab moral dan sosial yang sejalan dengan misi dakwah dan pendidikan Muhammadiyah.

Dalam konteks perguruan tinggi Muhammadiyah, pelaporan keberlanjutan mencakup berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan tersebut meliputi program pengabdian kepada masyarakat, pelatihan keterampilan, seminar dan *workshop* tentang isu sosial, serta kolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi.

Pelaporan keberlanjutan ini menampilkan secara transparan bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah mengelola dan melaksanakan program-program sosial, serta dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat, dengan demikian, laporan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga narasi yang menggambarkan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mewujudkan pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.



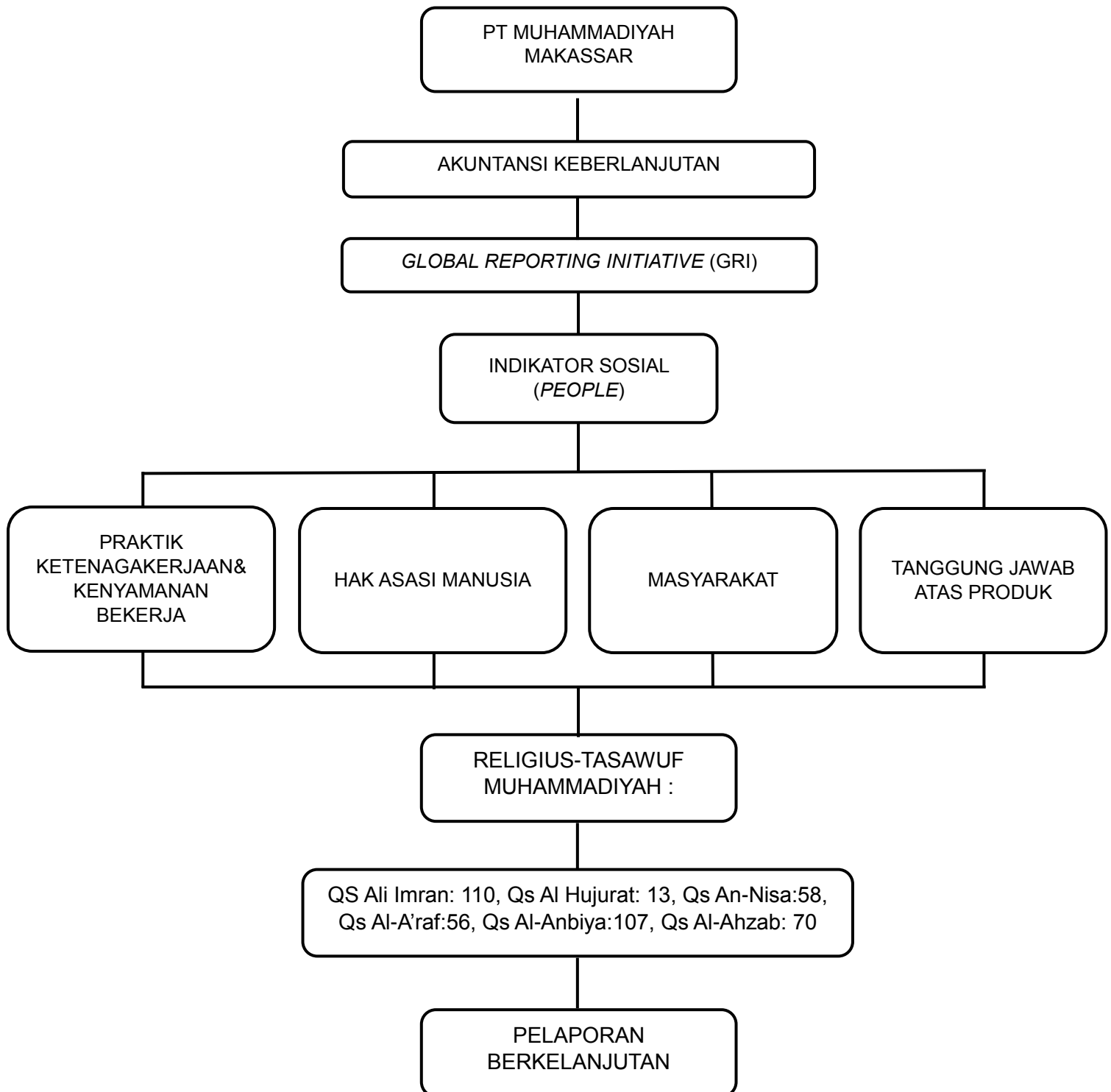
ilai-nilai religius yang menjadi landasan pelaporan keberlanjutan ini erat kaitannya dengan cita-cita Kiyai Ahmad Dahlan, pendiri

Muhammadiyah, yang menekankan pentingnya pendidikan dan dakwah sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup umat. Kiyai Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus dipadukan dengan nilai moral dan spiritual untuk menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan peduli terhadap sesama.

Pelaporan keberlanjutan pada perguruan tinggi Muhammadiyah merefleksikan semangat tersebut dengan menonjolkan bagaimana program-program yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk pengembangan akademik semata, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya. Pendekatan ini membuka ruang untuk analisis kritis yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya khas Muhammadiyah, sekaligus memperkuat legitimasi sosial institusi sebagai agen perubahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan pada perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi instrumen strategis yang menghubungkan visi dan misi institusi dengan aspirasi masyarakat luas, sekaligus mengaktualisasikan warisan nilai-nilai Kiyai Ahmad Dahlan dalam era modern yang penuh tantangan. Sehingga ditarik kesimpulan pada gambar di bawah ini:





Gambar 2.4
Kerangka Konseptual

